



**Australian  
Aid**  | **ASEAN-Australia  
Counter Trafficking**

# Pengadilan Peka Korban

Panduan untuk Negara-Negara Anggota ASEAN

June 2022

**Penulis: Leisha Lister, Penasihat Senior ASEAN-ACT**

Hak cipta secara keseluruhan dan setiap bagian dari dokumen ini adalah milik Cardno dan tidak boleh digunakan, dijual, dialihkan, disalin, atau direproduksi secara keseluruhan atau sebagian dengan cara apa pun atau di dalam atau pada media apa pun atau kepada orang lain, selain berdasarkan perjanjian dengan Cardno. Dokumen ini dibuat oleh Cardno semata-mata untuk kepentingan dan penggunaan oleh klien sesuai dengan ketentuan perikatan. Cardno tidak dan tidak akan memikul tanggung jawab atau kewajiban apa pun kepada pihak ketiga mana pun yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan apa pun oleh pihak ketiga mana pun pada konten dokumen ini.

**Pernyataan Sangkalan:** Pemerintah Australia telah mendanai publikasi ini melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

Foto sampul oleh: Paolo Nicoletto and Hakan Nural on Unsplash, Dong Nhat Huy on Shutterstock

**Australian** | **ASEAN-Australia**  
**Aid**  | **Counter Trafficking**

# Pengadilan Peka Korban

Panduan untuk Negara-Negara Anggota ASEAN








# Daftar Isi




Ringkasan .....	6
Ketentuan-ketentuan ACTIP.....	8
Prinsip-prinsip Utama .....	12
8 Indikator pada Pengadilan Peka Korban.....	13
Lampiran 1: Indikator Penilaian Mandiri VSC .....	52

 <b>Indikator 1 .....</b>	<b>14</b>
Ringkasan.....	14
Prinsip.....	14
Contoh-contoh Internasional.....	14


 <b>Indikator 5.....</b>	<b>35</b>
Ringkasan.....	36
Prinsip.....	36
Contoh-contoh Internasional.....	36

 <b>Indikator 2.....</b>	<b>17</b>
Ringkasan.....	17
Prinsip.....	17
Contoh-contoh Internasional.....	18

 <b>Indikator 6.....</b>	<b>38</b>
Ringkasan.....	38
Prinsip.....	38
Contoh-contoh Internasional.....	39

 <b>Indikator 3.....</b>	<b>23</b>
Ringkasan.....	23
Prinsip.....	23
Contoh-contoh Internasional.....	24

 <b>Indikator 7.....</b>	<b>40</b>
Ringkasan.....	40
Prinsip.....	41
Contoh-contoh Internasional.....	43

 <b>Indikator 4 .....</b>	<b>27</b>
Ringkasan.....	27
Prinsip.....	28
Contoh-contoh Internasional.....	29

 <b>Indikator 8.....</b>	<b>47</b>
Ringkasan.....	47
Prinsip.....	48
Contoh-contoh Internasional.....	49

# Ringkasan

“

*Respon peradilan pidana yang berpusat pada korban mewajibkan hakim untuk menempatkan korban sebagai pertimbangan utama dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial mereka, dan menekankan pada praktik-praktik yang dapat secara efektif melindungi korban dari bahaya lebih besar. Keselamatan dan kesejahteraan korban tidak hanya menjadi tujuan utama, namun dengan menempatkan keselamatan dan martabat korban sebagai pusat dari segala intervensi peradilan pidana akan memberi peluang lebih besar untuk mendorong kerjasama korban dengan sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>*

”

## Tujuan Pendekatan yang Berorientasi Kepada Korban

- ▶ Untuk melindungi dan mengedepankan hak-hak saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.
- ▶ Untuk mengurangi kemungkinan mengalami reviktimisasi oleh sektor peradilan pidana.
- ▶ Untuk membantu sektor peradilan pidana, terutama pengadilan, memahami dan mengakui peran korban dan saksi serta kebutuhan mereka selama proses peradilan pidana.
- ▶ Untuk memandu sektor peradilan pidana, terutama pengadilan, dalam menerapkan pendekatan yang peka dan berorientasi pada korban saat menangani perkara perdagangan orang pada sistem peradilan pidana.

## Pendekatan yang Berorientasi Kepada Korban & Praktik Baik Internasional

“

*Hak asasi manusia korban perdagangan orang harus menjadi pusat dari segala upaya dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang...langkah-langkah penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak boleh menimbulkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan martabat seseorang, terutama, hak mereka yang telah menjadi korban perdagangan orang, imigran, pengungsi internasional, pengungsi lokal dan pencari suaka.<sup>2</sup>*

”

1 UNODC, “Blueprint for Action: An Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against Women”, in UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (2014), tersedia pada [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening\\_Crime\\_Prevention\\_and\\_Criminal\\_Justice\\_Responses\\_to\\_Violence\\_against\\_Women.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf)

2 The UN High Commissioner for Human Rights and Human Trafficking 2002

Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, kesaksian korban sering kali menjadi sumber bukti tunggal, sehingga sulit sekali untuk menuntut pelaku. Menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban artinya menempatkan korban di tengah-tengah atau sebagai prioritas untuk segala tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan itu dapat berupa memberikan informasi kepada korban agar mereka dapat membuat keputusan yang dinformasikan (informed decision) tentang partisipasi korban dalam proses hukum, menjelaskan hak-hak dan kepentingan mereka untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan memastikan terpeliharanya kerahasiaan dan privasi korban secara ketat. Apabila lembaga peradilan pidana dapat menjalankan pendekatan berorientasi korban dalam pekerjaannya maka mereka akan mampu melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa martabat, privasi, serta keselamatan korban terlindungi.

## **Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)**

Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) dikembangkan sebagai pengakuan atas meningkatnya masalah perdagangan orang yang terjadi di wilayah ASEAN dan melibatkan negara-negara anggota ASEAN.

ACTIP, ditandatangani oleh kesepuluh negara ASEAN pada November 2015, menetapkan kewajiban yang mengikat secara hukum untuk membantu negara-negara anggota ASEAN untuk menghadapi tantangan, prioritas, dan strategi nasional mereka yang beraneka ragam guna melawan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Pasal 1, yang mengatur tentang tujuan utama ACTIP, mengakui adanya kebutuhan untuk memperkuat perlindungan bagi dan bantuan untuk korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Delapan (8) Indikator Peka Korban dalam Buku Panduan ini diturunkan dari kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.

# Ketentuan-ketentuan ACTIP

**Pasal 1 (Tujuan)** - mengatur tentang tujuan utama ACTIP dan mengakui adanya kebutuhan untuk memperkuat perlindungan bagi dan bantuan untuk korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

- ▶ Pasal 16 - sehubungan dengan penegakan dan penuntutan hukum dan mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh otoritas yang menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dibekali dengan pengetahuan yang memadai dalam melindungi hak-hak korban TPPO, menangani perkara TPPO tersebut secara efisien serta menjaga privasi korban.



## Pencegahan Perdagangan Orang

**Pasal 11 (Pencegahan Perdagangan Orang)** - mengatur tentang pencegahan perdagangan orang dan mewajibkan negara anggota menerapkan langkah-langkah yang memberikan perlindungan pada korban agar tidak mengalami reviktimisasi dan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah serta untuk memperkuat langkah-langkah legislatif guna mencegah TPPO.

Pasal 11 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk:

- membuat kebijakan dan program yang komprehensif serta menerapkan langkah-langkah yang relevan guna mencegah dan melawan perdagangan orang serta melindungi korban (terutama perempuan dan anak) agar tidak mengalami reviktimisasi;
- melakukan penelitian dan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah terkait dengan faktor-faktor risiko perdagangan orang seperti kemiskinan; dan
- memperkuat langkah-langkah legislatif dan edukatif guna mencegah dan melawan perdagangan orang.

### **Pasal 12 (Area Kerja Sama)**

Pasal ACTIP ini tidak membebankan sebuah kewajiban bagi negara anggota ASEAN dan menyarankan agar negara anggota menerapkan ketentuan yang relevan “selaras dengan perundang-undangan nasional”. Pasal tersebut menjelaskan tentang peluang di bidang-bidang kerja sama, misalnya:

1. Menerapkan langkah-langkah untuk menurunkan permintaan yang menyuburkan industri perdagangan orang;
2. Menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat kerja sama regional dalam upaya penyelidikan dan penuntutan hukum; serta
3. Secara umum mengembangkan kapasitas untuk melawan perdagangan orang.

### ***Pasal 13 (Kerja Sama Lintas-Perbatasan, Pengendalian, dan Validitas Dokumen)***

Pasal 13 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk:

4. Berupaya menjalin kerja sama lintas batas dengan cara, di antaranya, membangun saluran-saluran komunikasi dan saling bertukar informasi intelijen; dan
5. Menerapkan pengendalian lintas-batas yang efektif, pengendalian tersebut terkait dengan penerbitan dokumen identitas dan dokumen perjalanan serta memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah pembajakan, pemalsuan atau penyalahgunaan identitas atau dokumen perjalanan.



## **Perlindungan Korban**

***Pasal 14 (Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang)*** - mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban terkait dengan keselamatan fisik mereka, melindungi identitas mereka, memastikan bahwa korban dengan kebutuhan khusus seperti anak dan penyandang disabilitas diakomodir kebutuhannya dengan layak. Pasal 14 juga mewajibkan negara anggota memastikan adanya langkah-langkah bagi korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul.

Pasal 14 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk membuat pedoman atau prosedur nasional mengenai identifikasi korban perdagangan orang yang tepat dan dimana perdagangan orang tersebut terjadi di lebih dari satu negara, anggota ASEAN wajib menghormati dan mengakui pengidentifikasian seseorang yang dilakukan oleh anggota ASEAN lainnya. Di samping itu, pasal ini bertujuan untuk melindungi korban dengan merekomendasikan bahwa negara anggota ASEAN perlu:

- i. mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat memfasilitasi korban agar tetap dapat berada di wilayahnya dalam jangka waktu sementara atau permanen serta memastikan keselamatan fisik korban selama berada di negara tersebut;
- ii. memastikan privasi dan identitas korban perdagangan orang serta kerahasiaan dari proses hukum yang melibatkan korban tersebut;
- iii. tidak membuat korban perdagangan orang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari kondisi mereka sebagai korban;
- iv. tidak menahan korban perdagangan orang tanpa alasan di rumah detensi imigrasi atau penjara; dan
- v. memberikan layanan perawatan dan dukungan bagi korban perdagangan orang serta membantu proses reintegrasi mereka.

### ***Pasal 15 (Repatriasi dan Pemulangan Korban)***

Pasal 15 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk:

- i. memverifikasi apakah korban adalah warga negara atau penduduk tetap negaranya tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- ii. memfasilitasi dan menerima tanpa penundaan yang tidak semestinya dan memperhatikan keselamatan korban yang merupakan warga negara atau memiliki hak sebagai penduduk tetap di negara mereka;
- iii. dimana korban tidak memiliki dokumentasi yang sah, memberikan kepada korban dokumen perjalanan yang dibutuhkan dan otorisasi untuk memungkinkan mereka kembali masuk ke wilayah negaranya; dan
- iv. mengadopsi peraturan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menerapkan program repatriasi.



## **Penegakan Hukum**

### ***Pasal 16 (Penegakan Hukum dan Penuntutan)***

Pasal 16 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk:

- i. mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk membekali pihak otoritas dan sistem hukum yang ada dengan sumber daya yang memadai untuk menangani perdagangan orang;
- ii. mengambil langkah-langkah untuk mendeteksi, menindak, dan menghukum segala partisipasi individual dalam perdagangan orang;
- iii. menempuh semua langkah yang diperlukan untuk melindungi saksi dan korban terkait tindak pidana perdagangan orang
- iv. saling bekerjasama dalam upaya memberikan dukungan bagi korban perdagangan orang untuk secara sukarela setuju memasuki dan tinggal sementara di wilayah terkait untuk tujuan menuntut pelaku; dan
- v. menerapkan periode batas waktu penuntutan yang panjang di dalam peraturan-perundang-undangan domestik mereka, terkait periode dari dimulainya persidangan atas tindak pidana berdasarkan ACTIP

### ***Pasal 17 (Perampasan dan Penyitaan)***

Pasal 17 ACTIP mewajibkan anggota ASEAN untuk:

- i. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pengidentifikasian, penelusuran, pembekuan dan/atau penyitaan hasil-hasil yang berasal dari, atau properti yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang menurut ACTIP; dan
- ii. memberdayakan pengadilan mereka atau pihak yang berwenang lainnya untuk memberikan perintah agar catatan perbankan, keuangan atau niaga lainnya diberikan, termasuk tidak mengizinkan adanya segala penolakan untuk memberikan catatan tersebut dengan alasan kerahasiaan bank.

### ***Pasal 19 (Ekstradisi)***

Menurut Pasal 19 ACTIP:

- i. segala tindak pidana perdagangan orang yang terjadi menurut Pasal 5 (Kriminalisasi Perdagangan Orang) dari ACTIP harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi, yang wajib dilakukan oleh negara anggota

- ASEAN, ketentuan ini harus diikutsertakan di setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat dengan negara anggota ASEAN lainnya;
- ii. bila tidak ada perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN yang terkait, maka ACTIP harus dipertimbangkan sebagai landasan hukum ekstradisi; dan
  - iii. bila suatu negara anggota ASEAN tidak mengekstradisi seorang tersangka pelaku perdagangan orang karena orang tersebut adalah warga negara mereka, maka negara tersebut wajib untuk mengajukan perkara terkait kepada pihak berwajib di negaranya untuk tujuan penuntutan hukum terhadap tersangka pelaku perdagangan orang.

***Pasal 22 (Penyerahan Hasil Tindak Pidana atau Kekayaan yang Dirampas)***

Menurut Pasal 22 ACTIP:

- i. segala hasil dari kejahatan atau properti yang disita oleh suatu negara anggota ASEAN berdasarkan ketentuan ACTIP, wajib diserahkan oleh negara anggota tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan tata cara administrasi dalam negerinya; dan
- ii. bila diminta oleh suatu negara anggota ASEAN, maka negara anggota ASEAN lainnya perlu memberikan pertimbangan prioritas untuk mengembalikan segala hasil kejahatan atau properti yang disita tersebut agar dapat diberikan sebagai kompensasi dan bantuan kepada korban perdagangan orang atau agar hasil kejahatan atau properti yang disita tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah.



**Pemantauan & Kepatuhan**

***Pasal 24 (Pengawasan, Peninjauan Ulang dan Pelaporan)***

Pasal 24 ACTIP mewajibkan Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (SOMTC), yang didukung oleh Sekretariat ASEAN, untuk mendorong, mengawasi, meninjau ulang, dan melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan ACTIP kepada Pertemuan Menteri ASEAN tentang Tindak Pidana Transnasional (AMMTC).



# Prinsip-prinsip Utama

Indikator Peka Korban didasari dari Protokol untuk Mencegah, Menangkal dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapinya Konvensi PBB tentang Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional

Indikator Peka Korban dilandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Panduan PBB tentang Peradilan yang Melibatkan Anak sebagai Korban dan Saksi Tindak Kejahatan<sup>3</sup>, Rekomendasi Prinsip dan Panduan tentang Hak Asasi Manusia<sup>4</sup>, dan UNODC Toolkit to Combat Trafficking in Persons.<sup>5</sup>

Prinsip paling utama dari pendekatan yang berorientasi pada korban adalah bahwa korban tindak pidana perdagangan orang merupakan korban kejahatan dan oleh karena itu mereka berhak mendapatkan keadilan. Mereka perlu diperlakukan dengan rasa empati dan bermartabat, seluruh layanan harus berpusat pada korban<sup>6</sup> dan perlindungan khusus perlu diberikan kepada mereka yang rentan seperti anak dan penyandang disabilitas.

Prinsip utama pendekatan ini adalah untuk:

- **Memberdayakan** korban dengan mendukung dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses.
- **Mengurangi** kemungkinan timbulnya viktimisasi sekunder dan trauma kembali pada korban.
- **Membangun** kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pengadilan.
- **Melindungi** integritas dari sistem peradilan pidana.

3 The Trafficking in Persons Protocol was adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000 (annex II). It entered into force on 25 December 2003. The ratification status of the Protocol can be consulted at: [www.unodc.org/en/treaties/CTOC/signatures](http://www.unodc.org/en/treaties/CTOC/signatures). See also the annotated guide available at: [www.globalrights.org/site/DocServer/Annotated\\_Protocol.pdf?docID=2723](http://www.globalrights.org/site/DocServer/Annotated_Protocol.pdf?docID=2723)

4 ECOSOC Resolution 2005/20

5 Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking; report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council (2002) (E/2002/68/Add.1)

6 Korban perlu diperlakukan dengan penuh kasih dan kepekaan sepanjang proses peradilan, mempertimbangkan situasi pribadi dan kebutuhan segera mereka, termasuk usia, gender, disabilitas dan tingkat kematangan serta menghormati sepenuhnya integritas fisik, mental dan moral mereka. Korban harus diperlakukan sebagai sosok dengan kebutuhan, keinginan dan perasaan mereka sebagai individu.

# 8 Indikator Peka Korban untuk Pengadilan

Ada 8 area penting yang perlu diperhatikan oleh pengadilan dan pemangku kepentingan sistem peradilan ketika menangani kasus-kasus perdagangan orang. Indikator Peka Korban (VSI) berfungsi sebagai suatu kerangka dan titik rujukan untuk membantu sektor Peradilan, terutama pengadilan, untuk melindungi hak-hak korban perdagangan orang.



Sebuah video singkat telah dibuat untuk memberikan gambaran umum dari indikator-indikator tersebut dan dapat dilihat dengan menekan gambar di bawah ini atau mengunjungi tautan berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=tZoiD2NfC0E>

## INDIKATOR

# 1

### Keselamatan & privasi



## Indikator 1: Memastikan keselamatan dan privasi korban perdagangan orang

### Ringkasan

Sangat penting bagi sektor peradilan untuk memastikan korban perdagangan orang dilindungi sepenuhnya dari bahaya, ancaman atau intimidasi lebih lanjut oleh pelaku dan pihak-pihak terkait. Hal ini artinya tidak boleh ada pengungkapan publik atas identitas korban perdagangan orang dan privasi mereka harus dihormati dan dilindungi seoptimal mungkin, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak dari tersangka untuk memperoleh pengadilan yang adil.<sup>7</sup> Hal ini juga berarti menempuh segala langkah yang tepat untuk memastikan keselamatan korban ketika mereka datang ke pengadilan, dan bahwa langkah-langkah tersebut diambil untuk mengidentifikasi dan memitigasi segala risiko bagi korban perdagangan orang ketika mereka menjadi saksi dalam sebuah perkara.



### Prinsip

#### *Apa yang harus diimplementasikan?*

- 1.1. Mengadakan sidang tertutup ketika seorang korban atau saksi yang rentan, memberikan kesaksian mereka (ACTIP Pasal 14.6)
- 1.2. Menyusun dan melaksanakan penilaian risiko/rencana keselamatan bagi korban/saksi yang menguraikan langkah-langkah untuk melindungi mereka selama proses peradilan pidana (ACTIP Pasal 14.5)
- 1.3. Putusan dalam kasus-kasus TPPO dibuat anonim dan dipublikasikan secara daring (ACTIP Pasal 14.6)
- 1.4. Terdapat prosedur pengadilan yang melarang publikasi informasi mengenai data terperinci tentang saksi/korban oleh media atau pada media sosial (ACTIP Pasal 14.6)



### Contoh-contoh Internasional:

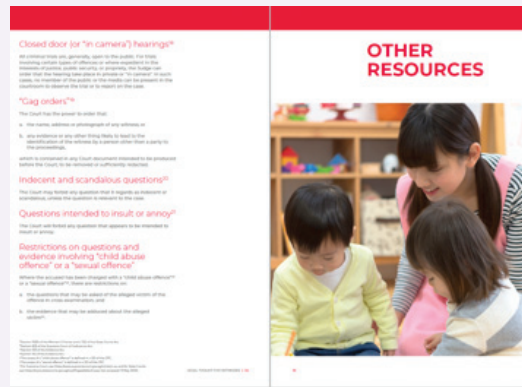
**Menutup persidangan untuk umum** - Di Australia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Persemakmuran memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengecualikan semua atau sebagian anggota masyarakat untuk menghadiri persidangan. Hal ini sangat penting untuk kasus-kasus yang melibatkan seorang anak atau saksi/korban yang rentan, misalnya seseorang yang diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti mengenai kekerasan fisik atau kekerasan seksual.

7 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip yang Disarankan dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Tindak Perdagangan Orang P11



## Informasi tentang strategi yang dapat dijalankan oleh pengadilan untuk melindungi saksi dan korban

Pengadilan Singapura menyusun sebuah Tuntunan Hukum Bagi Saksi (Legal Toolkit for Witnesses)<sup>8</sup> yang menjelaskan bagaimana pengadilan dapat memerintahkan sidang untuk dilangsungkan secara privat atau 'via-kamera' ) ketika persidangan ditutup bagi publik dan media. Mereka juga dapat mengimplementasikan 'Perintah Pembungkaman' (gag order) untuk melindungi saksi yang rentan, dengan melarang penerbitan informasi yang dapat mengidentifikasi data seseorang dipublikasikan. Informasi tersebut dapat meliputi nama, alamat, foto, atau hal lainnya yang dapat berujung pada pengidentifikasi saksi.



Tuntunan Hukum bagi Saksi

**Informasi tentang keselamatan untuk korban dan saksi** - Di Amerika Serikat di beberapa bagian yurisdiksi menyediakan informasi kepada saksi tentang cara melindungi keselamatan diri saat datang ke pengadilan.<sup>9</sup>

### Kehadiran di gedung pengadilan

- Upayakan agar tiba di pengadilan pada waktu yang berbeda dengan perkiraan waktu kedatangan terdakwa, untuk menghindari berpapasan dengan terdakwa, baik di jalan atau di antrian masuk gedung pengadilan. Bila terdakwa sering terlambat, cobalah tiba lebih awal. Bila terdakwa sering datang lebih awal, cobalah tiba menjelang waktu sidang Anda atau datangi bersama teman. Ingat: pastikan ada cukup waktu untuk melalui antrian, mesin detektor, dan sebagainya, agar Anda hadir di persidangan tepat waktu. Bila terlambat, perkara yang diajukan dipanggil dan Anda tidak ada maka gugatan perkara akan dibatalkan. Dalam perkara kekerasan rumah tangga, mencari pengacara atau advokat pendamping untuk pergi bersama Anda akan sangat membantu menjaga keselamatan Anda.. Hubungi National Domestic Violence Hotline(1-800-799-SAFE) untuk menemukan bantuan terdekat. Anda juga dapat menemukan daftar organisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga di area Anda melalui laman Advocates and Shelters (Pengacara dan Rumah Singgah) kami.
- Pastikan apakah kepolisian atau polisi setempat akan membawa Anda ke gedung pengadilan. Temui mereka di suatu tempat selain gedung pengadilan kemudian minta agar petugas tersebut mengawal Anda ke dalam. Mintalah petugas menunggu sampai Anda bertemu dengan petugas keamanan gedung pengadilan dan beri tahu mereka tentang situasi Anda. Usahakan untuk duduk dekat petugas pengadilan atau petugas keamanan jika memungkinkan
- Bawa teman atau anggota keluarga agar Anda tidak sendirian sepanjang hari.
- Bila teman atau anggota keluarga Anda tidak dapat mendampingi selama di pengadilan, mintalah agar mereka mengantar Anda ke pengadilan. Upayakan menggunakan mobil yang tidak dikenali pelaku. Minta mereka untuk menurunkan Anda di pintu masuk gedung pengadilan agar Anda tidak perlu berjalan sendirian di area parkir.

**Rencana Keamanan** - Di Australia, Aparatur Pengadilan Keluarga (*family court*) akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada korban dan mendiskusikan pengaturan seperti apa yang dibutuhkan agar korban dapat berpartisipasi dalam proses persidangan secara aman. Aparatur pengadilan membuat 'rencana keamanan' dengan berkonsultasi kepada saksi/korban, rencana tersebut menerangkan perlindungan seperti apa yang akan diterima oleh korban dari pengadilan, nomor kontak mana yang dapat dihubungi bila mereka mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan dalam beberapa kasus, dapat menyediakan petugas keamanan untuk mengawal korban ke dan dari pengadilan.<sup>10</sup>

**Apakah Anda merasa kuatir atas keselamatan Anda saat menghadiri persidangan?**

Pengadilan Tinggi (The Federal Circuit) dan Pengadilan Keluarga (Family Court) menempatkan keselamatan sebagai prioritas dan dapat membantu keamanan Anda dan keluarga Anda saat menghadiri persidangan.



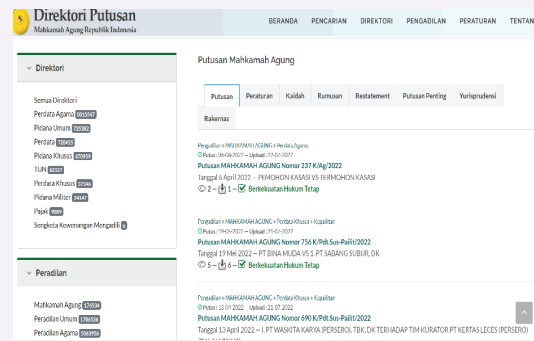
8 <https://hagar.org.sg/wp-content/uploads/2021/06/General-Legal-Toolkit-Handbook-for-Vulnerable-Witnesses.pdf>

9 <https://www.womenslaw.org/about-abuse/safety-tips/safety-court#1>

10 Lihat: <https://www.fcfoa.gov.au/sites/default/files/2021-08/Do-you-have-fears-for-your-safety-while-attending-court-0921V1.pdf>

**Memublikasikan putusan anonim secara daring** – Mahkamah Agung Indonesia memublikasikan putusan pengadilan untuk kasus TPPO secara daring melalui sebuah database bernama *Direktori Putusan*.<sup>11</sup>

Database tersebut dapat melakukan pencarian berdasarkan jenis kasus, tahun dan daerah. Memublikasikan putusan dalam perkara perdagangan orang merupakan hal yang penting karena mendukung transparansi yang lebih luas atas sidang pengadilan, membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan dan meningkatkan pemahaman publik tentang proses pengadilan. Memublikasikan putusan untuk umum juga menumbuhkan kesadaran dan memberikan efek jera ke orang lain untuk tidak terlibat dalam kegiatan serupa dan selain itu juga berfungsi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi edukasi hukum.



Sebagian besar negara menganonimkan putusan-putusan TPPO sebelum memublikasikannya untuk umum secara daring. Ada beberapa cara untuk menganonimkan sebuah putusan, di antaranya:

1. Menggunakan inisial para pihak saja (Serbia)
2. Menyunting putusan sehingga semua materi yang dapat mengungkap identifikasi tidak dapat dilihat (Amerika Serikat)
3. Menggunakan samaran yang dinyatakan pada laman muka putusan (Australia).

**a. Contoh dari Serbia untuk putusan yang dibuat anonim dengan menggunakan inisial para pihak saja**



**b. Contoh dari Amerika Serikat untuk putusan yang disunting**



Pertimbangan terkait lainnya adalah apakah “perintah tersebut perlu dilakukan untuk melindungi keselamatan seseorang:” s 8(1)(c) “Keselamatan” mencakup keselamatan psikologis.

AB (nama samaran) v R (No 3) pada (59). Saat mempertimbangkan s 8(1)(c), “pendekatan kemungkinan risiko” dapat diterapkan, dalam hal ini diperlukan pertimbangan terkait sifat, kesegeraan dan derajat kemungkinan bahaya yang dapat menimpa orang tersebut. Bila kemungkinan bahayanya sangat parah, maka akan lebih mudah disimpulkan bahwa perintah tersebut diperlukan, bahkan jika risikonya tidak lebih tinggi dari sekadar kemungkinan: AB (nama samaran) v R (No 3) pada (56), (59); Darren Brown (nama samaran) v R (No 2) (2019) NSWCCA 69 pada (37).

11 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

## INDIKATOR

# 2

### Alat bukti & proses persidangan



## Indikator 2: Bukti Primer - Cara bagaimana korban perdagangan orang merekam dan menghadirkan kesaksian mereka dalam persidangan

### Ringkasan

Korban perdagangan orang sering kali merasa rentan dan terbebani oleh sistem peradilan yang terasa asing bagi mereka dan dapat mengalami reviktimisasi akibat perlakuan yang tidak peka atau diskriminatif oleh sebagian aparaturnya pengadilan. Merupakan hal yang sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya trauma lebih dalam yang dapat timbul akibat menghadiri persidangan dan memberikan keterangan kesaksian sebagai alat bukti.

Dalam rangka memastikan bahwa proses pengadilan memaksimalkan kerja sama korban, maka penting sekali bagi pengadilan untuk menyediakan lingkungan pengadilan yang ramah dan mendukung korban TPPO agar mereka merasa aman dan nyaman dalam menceritakan kembali tentang apa yang pernah mereka alami, bahwa terdapat prosedur yang berlaku untuk mengurangi kemungkinan reviktimisasi, dan aturan pembuktian diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif.



### Prinsip

#### *Apa yang harus diimplementasikan?*

Untuk mengimplementasikan prinsip ini, Pengadilan harus memastikan:

- 2.1.** Perkara-perkara TPPO diprioritaskan atau dipercepat. Dengan menangani perkara-perkara tindak pidana perdagangan orang dengan cepat dan tepat serta mempercepat penanganan perkara yang melibatkan korban dari kelompok rentan, hal ini dapat membuat korban lebih bersedia untuk melaporkan perkara yang dialaminya serta dapat meningkatkan rasa percaya kepada pengadilan untuk menangani perkara tersebut secara efektif dan efisien (ACTIP Pasal 16.3)
- 2.2.** Terdapat langkah-langkah untuk memastikan bahwa korban diberikan peluang untuk dan didukung dalam persidangan pidana, dengan cara:
  - a) Menggunakan saksi ahli (misalnya saksi perantara) untuk memberikan keterangan ahli sebagai alat bukti bila dibutuhkan tentang dinamika dan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang; informasi tentang saksi yang rentan seperti dampak terhadap trauma, pengaruhnya terhadap anak-anak, bukti kekerasan seksual dari forensik serta dokter medis, dan sebagainya. (ACTIP Pasal 14.10)

- b) Mengizinkan korban untuk didampingi oleh orang yang mereka pilih saat memberikan kesaksian di pengadilan (bahkan dalam persidangan tertutup) dan selama proses persidangan<sup>12</sup> (ACTIP Pasal 14.10)
- c) Memastikan bahwa terdapat juru bahasa yang memenuhi syarat sehingga korban dapat memahami dan berpartisipasi dengan optimal selama mengikuti persidangan (ACTIP Pasal 14.10b)

**2.3.** Adanya pengaturan yang berlaku untuk memastikan agar korban (yang setuju untuk berpartisipasi) dapat melakukannya tanpa melihat tersangka dengan menggunakan:

- a) Menyediakan penyekat untuk memastikan terdakwa tidak dapat melihat korban (ACTIP Pasal 14.6)
- b) Menggunakan teknologi konferensi video agar saksi/korban dapat memberikan kesaksiannya secara jarak jauh dari lokasi atau ruangan yang berbeda (ACTIP Pasal 16.7)
- c) Bukti kesaksian video yang sudah direkam lebih dulu diputar di pengadilan sebagai pengganti kehadiran saksi/korban memberikan keterangan kesaksiannya (ACTIP Pasal 16.7)
- d) Tersedianya pintu masuk dan ruang tunggu terpisah bagi saksi/korban selama masa persidangan, baik sebelum dan setelah menyampaikan kesaksian. (ACTIP Pasal 16.7)

**2.4.** Penggunaan 'pernyataan dampak korban' atau Victim Impact Statement/VIS guna memastikan bahwa hakim memiliki penilaian komprehensif mengenai dampak terhadap korban yang ditimbulkan oleh pelaku (untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita) (ACTIP Pasal 14.13)



### Contoh-contoh Internasional:

Banyak yurisdiksi yang telah memperkenalkan cara-cara tertentu, seperti menggunakan layar, memberikan bukti melalui tautan video atau memutar rekaman wawancara polisi, tidak mengenakan toga kehakiman resmi dan mengosongkan galeri umum pengadilan. Langkah-langkah khusus ini telah dievaluasi di Inggris dan Wales<sup>13</sup> dan terbukti berhasil mengurangi kecemasan pada korban.

**Bukti Rekaman Video** - Di banyak yurisdiksi di seluruh dunia, ada ketentuan dalam perundang-undangan yang mengizinkan saksi yang rentan untuk memberikan kesaksian dalam kondisi yang memudahkan bagi mereka. Kondisi ini termasuk memberikan kesaksian melalui wawancara yang sudah direkam, yang dilakukan oleh polisi. Rekaman video tersebut dapat disunting untuk menghilangkan pernyataan korban yang tidak sesuai sebelum diputar di pengadilan. Jenis kesaksian seperti ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada jaksa, pekerja sosial, dan pendamping korban agar korban tidak perlu menceritakan kembali kisah mereka secara berulang.

<sup>12</sup> Di beberapa yurisdiksi, teknik umum yang dilakukan adalah pengacara pembela akan memanggil anggota keluarga korban sebagai saksi potensial, sehingga mereka tidak mampu membantu korban di pengadilan dan menempatkan tekanan tambahan kepada korban. Penting sekali bagi pengadilan dan jaksa penuntut untuk mengetahui strategi yang digunakan sebagian pengacara pembela dan menolak permohonan ini.

<sup>13</sup> Olivia Smith dan Tina Skinner, "Observing Court Responses to Victims of Rape and Sexual Assault", *Feminist Criminology*, vol. 7, No. 4 (2012).



Dalam tradisi hukum sipil, keterangan kesaksian korban direkam di hadapan hakim dengan kehadiran pengacara pembela agar dapat memberikan pertanyaan kepada korban sewaktu-waktu. Di negara-negara yang menggunakan hukum umum, rekaman keterangan dibuat selama pemeriksaan berlangsung, namun korban harus hadir untuk menjawab pertanyaan dari pengacara pembela selama pemeriksaan silang.

Pengadilan Kerajaan (*Crown Court*) di Inggris dan Wales telah memperkenalkan langkah-langkah khusus ini yang menghindarkan saksi dan korban rentan dari trauma akibat menghadiri pengadilan dan mengizinkan anak-anak serta saksi yang rentan lainnya untuk menjalani pemeriksaan silang melalui video yang direkam dan diputarkan selama persidangan. Perekaman tersebut dilakukan sesegera mungkin setelah tindak pidana dilakukan untuk membantu ingatan dan mengurangi stres saat memberikan kesaksian dalam ruang pengadilan.<sup>14</sup> Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bukti yang direkam sebelumnya di Webinar ASEAN ACT - Mode Alternatif untuk menghadirkan kesaksian korban di <https://aseanactpartnershiphub.com/events/>

**Teknologi konferensi video** - menghubungkan para pihak dengan persidangan pengadilan tanpa mengharuskan mereka melakukan perjalanan, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi persidangan. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa saksi penting dalam kasus perdagangan orang dapat memberikan kesaksian kepada pengadilan. Manfaat lain dari kesaksian melalui video adalah kemampuan untuk tersambung dengan juru bahasa yang mungkin berada di lokasi yang berbeda. Misalnya, akan sulit untuk menemukan seorang juru bahasa Khmer bagi korban perdagangan orang warga Kamboja yang bersaksi di pengadilan Malaysia atau Thailand. Kesaksian melalui tautan-video memungkinkan **juru bahasa yang relevan** untuk tersambung dari jarak jauh dan tersedia dengan biaya yang lebih rendah bagi pengadilan.

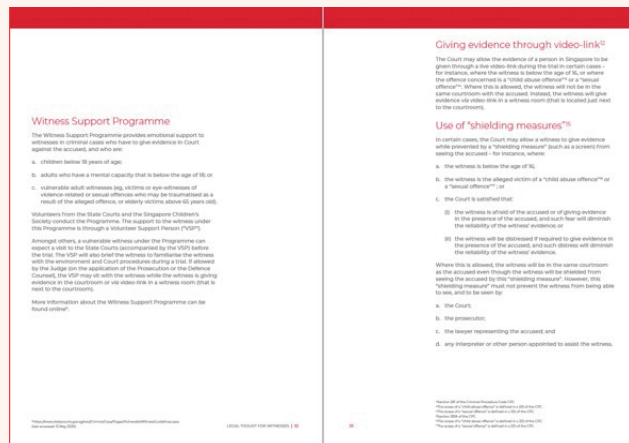
**Layar Privasi Korban** - Di pengadilan-pengadilan di mana kesaksian melalui video atau fasilitas televisi sirkuit tertutup (CCTV) tidak tersedia, seorang saksi yang rentan harus diperbolehkan untuk memberikan bukti menggunakan cara alternatif, misalnya secara privat dari balik layar di ruang sidang atau dari bangunan dan fasilitas alternatif. Seorang saksi yang rentan harus diizinkan untuk mempunyai pendamping, misalnya orang tua atau teman yang mereka pilih, untuk duduk bersama mereka saat mereka memberikan kesaksian.



Sebuah layar penyekat privasi untuk korban sedang dipasang di sebuah pengadilan di Jerman karena tidak tersedianya CCTV.

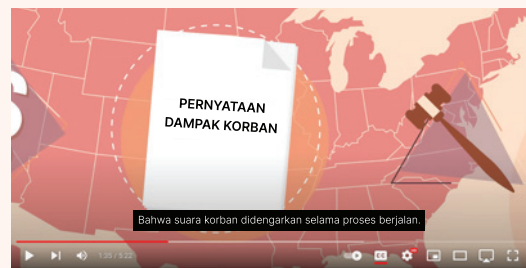
14 <https://www.gov.uk/government/news/new-courtroom-protections-for-vulnerable-victims-available-nationwide>

**Menyampaikan informasi kepada korban tentang langkah-langkah yang tersedia** - Tuntunan Hukum bagi Saksi (*Legal Toolkit for Witnesses*)<sup>15</sup> di Singapura, menjelaskan cara Pengadilan Singapura menerapkan ‘pengaturan perisai’ untuk melindungi saksi rentan dengan cara memberikan mereka pilihan untuk memberikan kesaksiannya melalui tautan video atau dengan menempatkan layar penyekat di antara saksi dan terdakwa. Hal ini penting sekali diketahui oleh saksi sejak awal agar mereka dapat meminta pengaturan tersebut disediakan.



*Tuntunan Hukum untuk Saksi*

**Pernyataan Dampak Korban (Victim Impact Statements - VIS)** - Profesor Paul Cassell dari Amerika Serikat berbicara di video YouTube tentang bagaimana pernyataan dampak korban dapat memberikan korban sebuah peluang untuk menyampaikan kepada pihak terdakwa, dan sekaligus menceritakan kepada pengadilan tentang bagaimana kejahatan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka dan di sebagian perkara memberikan kesempatan kepada korban untuk menyatakan kalimat “akhir” mereka. Pernyataan dampak adalah sarana untuk memastikan bahwa suara korban didengarkan dalam persidangan pidana.

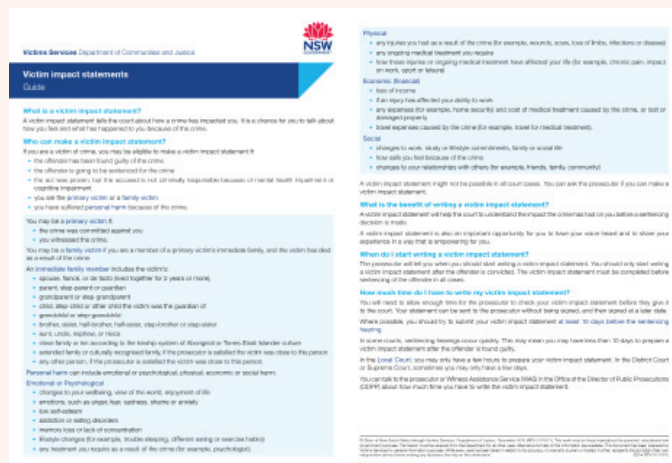


<https://www.youtube.com/watch?v=UtGr6p81VBE>

**Panduan tentang Pernyataan Dampak Korban bagi Korban Kejahatan**<sup>16</sup> - Pemerintah Negara Bagian New South Wales, Australia menyusun sebuah Buku Pedoman untuk membantu korban kejahatan membuat ‘Pernyataan Dampak Korban’ yang dibaca oleh hakim, setelah terpidana divonis bersalah atas kejahatannya dan sebelum hukuman diberikan. Pernyataan dampak korban menceritakan kepada pengadilan bagaimana tindak kejahatan berdampak terhadap korban dan hal tersebut memberikan korban kesempatan untuk menceritakan bagaimana kejahatan itu mempengaruhi mereka: secara finansial, emosional, dan fisik.

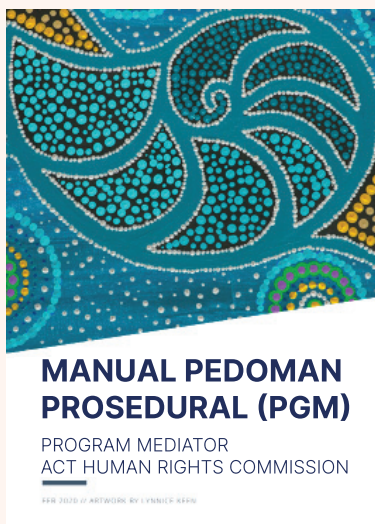
15 <https://hagar.org.sg/wp-content/uploads/2021/06/General-Legal-Toolkit-Handbook-for-Vulnerable-Witnesses.pdf>

16 <https://victimsservices.justice.nsw.gov.au/documents/victims-rights/charter-of-victims-rights/victim-impact-statement-guide.pdf>



**Panduan tentang Pernyataan Dampak Korban bagi Korban Kejahatan**

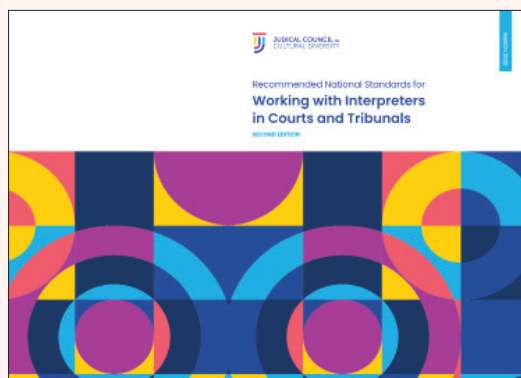
**Penggunaan Mediator atau intermediaries** - Mediator membantu saksi untuk mengomunikasikan kesaksian mereka dengan lebih baik. Di Canberra, Australia, perantara adalah aparaturnya pengadilan yang telah menjalani pelatihan ketat agar dapat diakreditasi. Peran mereka adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara saksi dan polisi, dan antar saksi, pengacara, serta para pihak lain di pengadilan selama proses persidangan pidana. Mediator tersebut berpengalaman memfasilitasi komunikasi saksi yang memiliki masalah keterlambatan bahasa (language delay), isu gangguan kesehatan mental, ketidakmampuan belajar atau 'learning disability', isu gangguan kognitif, dan trauma. Mediator adalah peserta imparial di dalam proses pengadilan, yang memiliki fokus untuk membantu penyampaian komunikasi kesaksian saksi/korban secara efektif. Sebagai aparaturnya pengadilan yang tidak berpihak, mereka terikat pada perundang-undangan yang mengatur perilaku dan melarang mereka untuk mendiskusikan isi dari kesaksian.



Manual Pedoman Prosedural<sup>17</sup>

17 <https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2020/05/1.-ACT-Intermediary-Procedural-Guidance-Manual-FEBRUARY-2020.pdf>

**Penggunaan Juru Bahasa** - Pekerjaan juru bahasa sangat penting untuk memastikan akses terhadap keadilan dan keadilan prosedural. Dewan Yudisial Australia tentang Keanekaragaman Budaya (JCCD) mengembangkan Standar Nasional untuk Bekerja dengan Penerjemah di pengadilan dan tribunal<sup>18</sup> untuk menetapkan standar yang direkomendasikan dan optimalisasi praktik penggunaan juru bahasa di pengadilan Australia.



**Pendampingan hukum bagi korban** - Ada bukti yang menunjukkan bahwa korban yang didukung melalui proses hukum lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam penuntutan dan mampu memberikan bukti yang lengkap dan akurat. Tugas pendamping hukum dapat berkisar dari bertindak sebagai mediator selama proses pemeriksaan hingga memberikan advokasi dan menjadi kuasa di seluruh proses hukum, baik dalam penuntutan hukuman dan penerapan restitusi dan kompensasi.

---

18 <https://jccd.org.au/wp-content/uploads/2022/05/JCDD-Recommended-National-Standards-for-Working-with-Interpreters-in-Courts-and-Tribunals-second-edition.pdf>

## INDIKATOR

# 3

### Aparat penegak hukum



## Indikator 3: Interaksi – Bagaimana aparat penegak hukum dan hakim berinteraksi dengan saksi/korban.

### Ringkasan

Tanpa pengetahuan, keterampilan dan, kemampuan yang tepat, aparat penegak hukum dan hakim tidak akan mampu untuk memberikan layanan yang layak bagi korban perdagangan orang. Harus ada penyelenggaraan pelatihan yang memadai bagi anggota kepolisian, jaksa, aparaturnya pengadilan, tenaga kesehatan, dan lembaga pemerintah terkait tentang peraturan perundang-undangan dan prosedur untuk memastikan bahwa korban mempunyai akses ke keadilan serta mendapatkan perawatan dan rasa hormat yang sepatutnya. Pelatihan tersebut harus fokus pada perlindungan hak-hak korban serta memperhitungkan perlunya mempertimbangkan hak asasi manusia dan isu-isu yang peka anak dan gender.

Selain pelatihan, tanpa adanya Prosedur Standar Operasional, Standar Pelayanan Minimal, dan Pedoman Perilaku yang menguraikan tentang harapan dan konsekuensi atas pelanggaran akuntabilitas profesional dan tindak lanjut ketika persyaratan tersebut dilanggar, maka aparat penegak hukum dapat lolos dengan impunitas.



### Prinsip

#### *Apa yang harus diimplementasikan?*

- 3.1.** Tersedia unit/petugas khusus untuk menangani kasus-kasus TPPO di pengadilan (ACTIP Pasal 16.1)
- 3.2.** Pengadilan harus mempunyai pedoman dan Prosedur Standar Operasional (PSO) bagi semua aparaturnya pengadilan dan hakim tentang cara menangani perkara-perkara perdagangan orang. PSO tersebut harus fokus pada praktik-praktik yang sensitif korban dan pada pendekatan yang berbasis trauma. PSO tersebut harus memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dipatuhi, semua wawancara yang diperlukan telah dilakukan, bahwa semua bukti telah dikumpulkan dan diolah, bahwa jaksa dan hakim memiliki segala bukti dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengadili perkara dan bahwa saksi hadir dan siap untuk melanjutkan persidangan (ACTIP Pasal. 11.1(b) dan 14.10(c))
- 3.3.** Pengadilan harus membuat dan memberlakukan peraturan khusus dan Pedoman Perilaku yang mengatur tentang standar perilaku yang diharapkan dari hakim dan aparaturnya pengadilan serta konsekuensi ketika aturan tersebut tidak dipatuhi saat menangani perkara TPPO. Aturan-aturan ini harus dapat diakses oleh publik sebagaimana Piagam Hak-Hak Korban (ACTIP Pasal. 16.1)
- 3.4.** Pelatihan TPPO, yang diadakan bagi semua hakim dan aparaturnya pengadilan, dibuat berdasarkan pada pendekatan yang berbasis trauma dan disertakan ke dalam program akreditasi dan pelatihan yudisial yang sudah ada (ACTIP Art. 16.6)



## Contoh-contoh Internasional:

**Memperlakukan korban dengan hormat dan bermartabat** - Adalah hakim yang menetapkan situasi dan menciptakan lingkungan pengadilan yang adil dalam persidangannya. Semua yang hadir di persidangan berhak untuk diperlakukan dengan cara menghormati martabat mereka sebagai manusia dan hak asasi manusia yang mendasar. Undang-undang pidana di beberapa negara mengatur bahwa prinsip kehati-hatian dan kepekaan perlu diberlakukan ketika saksi berusia di bawah umur dan/atau telah mengalami dampak yang buruk atau trauma akibat tindak pidana terkait. Sebagaimana dicontohkan oleh bagian 19 dari *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Singapura*<sup>19</sup>:



19. Prinsip kehati-hatian dan kepekaan wajib dijalankan bila saksi berusia muda dan/ atau mengalami dampak buruk atau trauma akibat kejahatan terkait. Apabila saksi adalah seorang anak atau remaja sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Anak dan Remaja (Cap38), maka Jaksa dan Pengacara harus mewawancarai saksi dengan kehadiran Pengacara khusus Anak atau Petugas Perlindungan Anak jika memungkinkan. Pengacara Anak atau Petugas Perlindungan Anak harus diizinkan untuk meminta jeda selama wawancara, bila ia memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan saksi dalam memberikan kesaksiannya.

**Pedoman dan Prosedur Standar Operasional (PSO)** - Menjelaskan tentang tanggung jawab memastikan adanya pemahaman yang jelas atas harapani terhadap hakim, magistrat, dan aparaturnya pengadilan. Kedua contoh berikut ini merupakan petikan dari Perangkat Program Penguatan Peradilan Pasifik<sup>20</sup> yang dibuat untuk pengadilan di negara-negara Pasifik yang memperlihatkan bagaimana tanggung jawab dapat secara jelas diuraikan.



### Tanggung jawab Hakim dan Magistrat

#### Tanggung jawab Hakim dan Magistrat

- Hakim atau magistrat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saksi dan korban kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual merasa didukung dan dilindungi oleh pengadilan selama proses pengadilan berlangsung sehingga mereka dapat berpartisipasi tanpa rasa takut, dan di saat yang sama juga memastikan keadilan bagi terdakwa.
- Hakim/magistrat mempunyai tanggung jawab yang harus mereka laksanakan secara proaktif, bekerjasama secara erat dengan aparat pengadilan didalam tiga tahapan: pra-sidang, selama sidang dan pasca-sidang/pemidanaan.
- Hakim bertanggung jawab untuk selalu dapat mengendalikan perkara di ketiga tahapan tersebut.

Untuk latar belakang dan panduan lebih lengkap lihat Tuntunan tentang Hak Asasi Manusia (Human Rights Toolkit) PJST <https://www.fedcourt.gov.au/pjsi/resources/toolkits/Huma-Rights-Toolkit.pdf> terutama Bab 7

19 <https://www.agc.gov.sg/docs/default-source/newsroom-documents/media-releases/2013/code-of-practice-for-the-conduct-of-criminal-proceedings---final.pdf>

20 Lihat contoh Daftar Periksa 4 "Ketika korban kekerasan keluarga & kekerasan seksual datang ke pengadilan" untuk Ketua Mahkamah Agung, Hakim, Magistrat dan Aparatur Pengadilan: <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/PJSI%20-%20Human%20Rights%20Checklists.pdf>



Panduan untuk aparat pengadilan yang menguraikan tentang tanggung jawab mereka untuk menggunakan proses yang 'peka korban', dan dilengkapi dengan daftar tilik untuk memastikan bahwa seorang korban atau saksi berada dalam situasi yang aman ketika mereka datang ke pengadilan, panduan ini dikenal juga dengan sebutan 'Rencana Keamanan'. Daftar tilik dalam PSO merupakan alat yang baik untuk memastikan tersedianya semua layanan untuk melindungi saksi/korban.<sup>21</sup>



## Tanggung jawab Aparat Pengadilan

Aparat pengadilan ikut bertanggung jawab dengan Hakim/magistrat untuk memastikan bahwa saksi dan korban kekerasan rumah tangga dan seksual merasa didukung dan aman (secara fisik dan psikologis) untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan tanpa rasa takut....

Untuk latar belakang dan panduan lebih lengkap lihat Perangkat tentang Hak Asasi Manusia PSJT (PSJT Human Rights Toolkit) <https://www.fedcourt.gov.au/pjsi/resources/toolkits/Huma-Rights-Toolkit.pdf> terutama Bab 7

### Tanggung jawab Hakim dan Magistrat

- **Persiapan persidangan Tangani kerahasiaan saksi/ korban dengan sangat hati-hati** (terutama ketika ada kontak dengan terdakwa, korban atau anggota keluarga terdakwa atau anggota masyarakat lainnya)



### Memeriksa saksi/korban berada dalam situasi yang aman

- Bila mereka masih berada di lingkungan rumah, pertimbangkan baik-baik bagaimana cara menghubungi saksi/korban dengan aman (telpon mereka dan pastikan dulu apakah aman/ tepat waktunya untuk bicara dengan mereka).
- Pastikan tempat saksi/ korban tinggal saat ini dan apakah mereka berada dalam situasi yang aman. Tanyakan kepada mereka:
  - Apakah mereka merasa aman dari tersangka atau siapa pun di sekitar mereka
  - Apakah ada yang pernah mengancam dengan kekerasan kepada mereka sejak mereka membuat gugatan kepada polisi/ pengadilan?
  - Diskusikan pilihan mereka untuk berada di tempat yang lebih aman atau bagaimana membuat situasi mereka saat ini lebih aman (lihat panduan di bawah ini tentang cara membuat rencana keselamatan)

**Benchbooks** - Di Australia, Sekolah Tinggi Yudisial Victoria telah mengembangkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan (**Benchbooks**) untuk digunakan oleh hakim, staf pengadilan, dan profesional hukum lainnya yang memberikan informasi dan saran lebih lanjut mengenai hukum dan penerapannya.<sup>22</sup>

**Korban Kejahatan di Ruang Sidang** - Sekolah Tinggi Yudisial Australia juga telah mengembangkan buku pedoman komprehensif yang merinci pertimbangan bagi petugas peradilan dan aparat pengadilan untuk membatasi terjadinya trauma berulang terhadap korban dan meningkatkan peluang terjadinya paska-trauma, tanpa mengorbankan integritas sistem peradilan pidana.<sup>23</sup>

### Catatan 3: Pengalaman di Persidangan dan Kepercayaan Publik

#### Hal penting yang harus dipertimbangkan: Berinteraksi dengan saksi dan korban tindak kejahatan

<p><b>Beri teladan:</b> Anjurkan aparat pengadilan agar berusaha melakukan interaksi yang jelas, penuh rasa hormat dan keputusan terhadap korban dan pengujung.</p>	<p>Ketahui layanan pendukung: tanyakan kepada saksi/ korban, apakah layanan pendukung telah diakses dan apakah informasi umum tentang layanan pendukung sudah diberitahukan oleh aparat persidangan atau petugas peradilan pada awal persidangan.</p>	<p><b>Pertimbangan Peradilan Terbuka</b></p> <p>Kendati persidangan diyakini terbuka untuk umum, petugas peradilan dapat membatasi informasi tertentu tentang korban agar tidak diketahui secara umum dan, pada perkara khusus, membatasi akses ke ruang tempat perkara dipersidangkan.</p>
<p>Hargai korban: Sesuai situasi, cobalah untuk menunjukkan perhatian kepada korban, pertahankan kontak mata dan berinterkasihilah kepada korban atas partisipasinya.</p>	<p>Minimalkan kontak antara korban dan terdakwa: Pertimbangkan apakah aparat dapat membuat pengaturan fisik untuk meminimalkan kontak antara korban dan terdakwa.</p>	<p>Pembatasan informasi menjadi persoalan penting dan sensitif bagi korban, terutama anak-anak, orang-orang yang mengalami gangguan kognitif, dan korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga.</p>
<p>Perhatikan korban dalam manajemen perkara: Kenali kebutuhan tertentu korban dan pertimbangkan perannya selama proses berlangsung.</p>	<p>Ketahui dan pertimbangkan penggunaan aturan budaya: Baca Catatan Pedoman 6: Latar Belakang Budaya dan Bahasa yang Beragam.</p>	<p>Aparat pengadilan pun dapat mempertimbangkan penggunaan nama samaran bagi korban dan saksi dan penghapusan informasi identitas mereka dari dokumen putusan hukum atau sidang umum.</p>
<p>Perhatikan kebutuhan khusus: Apakah korban memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi agar dapat berpartisipasi dan terlibat maksimal dalam proses peradilan?</p>	<p>Perhatikan penggunaan bahasa: Pastikan pesan yang ingin disampaikan kepada korban melalui ucapan atau tindakan dapat dipahami, mengingat perbedaan latar belakang mereka</p>	<p>Untuk informasi lebih lanjut tentang peradilan terbuka dalam persidangan dan pengadilan Victoria, lihat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuasaan untuk Memberikan Perintah yang Sesuai dengan Peradilan Terbuka - Buku Panduan Pengadilan Sidang Terbuka (Open Courts Bench Book)</li> <li>• Sidang Praperadilan (committal) dan Prinsip-prinsip Sidang Terbuka - Manual Persidangan Pidana Victoria</li> </ul>
<p>Praktikkan pendekatan informasi trauma (trauma-informed): Praktik informasi trauma/ trauma-informed adalah salah satu praktik yang disesuaikan dengan seluruh aspek layanan, bagaimana berkomunikasi, dan berbagai pola tentang stress yang dapat memperburuk trauma pada orang yang memiliki gangguan dan kelemahan fisiologi dan psikologis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Trauma and the Law. Judicial College menjalankan program untuk mendukung aparat pengadilan agar menjalankan praktik informasi trauma.</p>	<p>Pahami bahwa pengadilan bukanlah tempat biasa bagi korban: Pahami bahwa korban dapat bereaksi emosional terhadap proses persidangan. Pertimbangkan untuk menjelaskan perilaku seperti apa yang diharapkan kepada semua pihak selama persidangan berlangsung.</p>	<p>Catatan Pedoman 6-14 berisi detail lebih lanjut tentang langkah-langkah yang dapat diambil persidangan untuk membantu korban yang memiliki kebutuhan beragam, termasuk korban anak, korban kekerasan dalam keluarga, dan korban dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, termasuk latar belakang suku Aborigin dan Piturni Selay Torres.</p>
<p>Ketahui dan pertimbangkan penggunaan mediator dan Aturan Dasar Persidangan (Ground Rules Hearing) - The College telah membuat video praktik terbaik yang dapat diakses secara daring.</p>	<p>Ingatkan pengamat tentang dampak alat bukti: Beberapa alat bukti dapat membuat korban tertekan, seperti foto atau rekaman audio-visual. Pertimbangkan untuk mengingatkan pengamat ketika alat bukti yang berpotensi mengganggu akan ditampilkan, dengan menjelaskan alasan mengapa alat bukti tersebut harus ditampilkan dan memberikan kesempatan pengamat untuk meninggalkan ruang persidangan secepat. Penundaan singkat memungkinkan penyimpangan menjadi tindak mencolok</p>	

21 <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/PJSI%20-%20Human%20Rights%20Checklists.pdf>

22 Lihat: <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/resources>

23 <https://www.judicialcollege.vic.edu.au/resources/victims-crime-courtroom>



## “Apa yang Kita Bisa dan Tidak Bisa Lakukan” - Di Indonesia

dan Australia, pengadilan telah menetapkan apa yang dapat dilakukan oleh aparat pengadilan tata usaha negara untuk penggugat, saksi dan klien pengadilan. Dokumen ini menguraikan dengan sangat jelas apa saja hak-hak saksi/korban dan apa yang dapat mereka harapkan dari pengadilan serta aparat pengadilan dan apa saja tanggung jawab pengadilan.<sup>24</sup>

**Piagam Hak-Hak Korban** adalah sebuah cara terbaik untuk menetapkan hak-hak korban dan saksi serta memperlihatkan kepada mereka bahwa Pengadilan menyikapi kebutuhan mereka dengan serius. Contoh dari Kanada ini mengatur empat prinsip hak-hak korban: Informasi, Perlindungan, Partisipasi dan, Restitusi, serta hak mereka untuk mengajukan pengaduan atas pelanggaran atau penyangkalan atas hak-hak mereka menurut Piagam ini. Piagam ini tersedia bagi publik dan dipublikasikan pada laman Pengadilan.<sup>25</sup>

24 Lihat contoh Pengadilan Agama Medan, Indonesia - <https://pa-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/hak-hak-pencari-keadilan>; Pengadilan Federal Australia Australia - <https://www.fcfoa.gov.au/pubs/can-cannot> dan Pengadilan Urusan Pertanahan (Land Court) - <https://www.lec.nsw.gov.au/lec/coming-to-court/what-court-staff-can-and-can-t-do.html>.

25 [https://crcvc.ca/general\\_resources/know-your-rights/](https://crcvc.ca/general_resources/know-your-rights/)

INDIKATOR

4

Informasi  
& layanan



## Indikator 4: Tersedianya informasi dan layanan bagi korban perdagangan orang ketika berhadapan dengan sistem peradilan formal

### Ringkasan

Akses ke informasi merupakan titik awal yang sangat penting bagi keikutsertaan korban perdagangan orang dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bahwa semua lembaga peradilan, termasuk pengadilan, mempunyai langkah-langkah yang memberikan korban TPPO informasi tentang pengadilan terkait dan persidangan administrasi serta memberikan bantuan agar pandangan dan kekhawatiran mereka dapat disampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan persidangan pidana yang sesuai.<sup>26</sup>

▶ Hakim, dalam peran kepemimpinan mereka, harus, bila memungkinkan, mengatur agar hal-hal berikut ini terselenggara di wilayah yurisdiksi mereka:<sup>27</sup>

▶ Saksi dan korban diberikan informasi dan materi tentang hak-hak mereka dalam istilah non-hukum, termasuk informasi mengenai:<sup>28</sup>

- proses sidang
- tata letak fisik dari gedung pengadilan/ruang sidang
- upah sebagai saksi bila tersedia bagi mereka
- dana kompensasi/pemulihan
- bantuan keuangan lainnya yang tersedia bagi mereka agar mereka dapat merealisasikan hak-hak mereka atas pemulihanyang memadai dan layak.

▶ Membuat ruang penerimaan/narahubung untuk memberikan korban dan saksi dengan informasi tentang layanan publik dan komunitas yang tersedia bagi korban TPPO termasuk intervensi krisis, konseling dan layanan pendukung lainnya bagi korban.

▶ Memastikan saksi dan korban diperlakukan dengan santun, dihargai, dan adil setiap saat.

Penting sekali bagi hakim untuk memahami bahwa korban perdagangan orang mempunyai hak sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum internasional atas pemulihan yang memadai dan layak. Hak ini sering kali tidak tersedia secara efektif bagi korban perdagangan orang karena mereka sering tidak mempunyai informasi tentang kemungkinan dan proses memperoleh kompensasi. Hakim harus, kapan pun memungkinkan, memastikan bahwa penerapan upaya hukum ini tersedia bagi korban dan ditangani secara bersamaan dengan persidangan.

26 Lihat: Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Vietnam telah menyetujui Konvensi tersebut pada 8 Juni 2012.

27 UNODCCP, , Buku Saku tentang Keadilan bagi Korban *Handbook on Justice for Victims*. [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Handbook\\_on\\_Justice\\_for\\_victims.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf)

28 Beberapa negara telah menetapkan kewajiban hukum dari pihak berwenang yang terlibat dalam persidangan pidana untuk menyampaikan informasi kepada korban kejahatan. Satu keuntungan dari pendekatan tersebut adalah tumbuhnya kesadaran para petugas akan tanggung jawab mereka terhadap korban.



## Prinsip

### *Apa yang harus diimplementasikan?*

**4.1.** Pengadilan harus menyediakan informasi dan materi yang tepat dalam beragam bentuk kepada korban perdagangan orang secara sederhana, dengan menggunakan istilah non-hukum dan dalam bahasa yang mereka pahami<sup>29</sup> mengenai:

- a) apa yang dimaksud dengan perdagangan orang; proses peradilan pidana termasuk posisi hukum korban; hak-hak mereka; pilihan mereka (untuk berpartisipasi atau tidak); layanan pendukung yang tersedia bagi korban dan estimasi jangka waktu sidang kasus perdagangan orang (ACTIP Pasal 14.9 & 14.10(b))
- b) prinsip non-hukuman agar korban memahami bahwa mereka tidak diminta pertanggungjawaban secara pidana atau administratif atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut terkait langsung dengan perdagangan orang yang mereka alami (ACTIP Art. 14.7)
- c) hak korban TPPO untuk mendapatkan restitusi/kompensasi (bila ada) atas kerugian serta trauma yang mereka alami serta proses pengajuannya<sup>30</sup> (ACTIP Art. 14.13)

**4.2.** Pengadilan telah menunjuk seorang narahubung/manajer perkara/koordinator saksi dan korban yang akan terus berhubungan dengan korban, memberikan kabar perkembangan status kasus dan menyediakan informasi rujukan kepada layanan pendampingan korban yang tersedia bagi mereka (ACTIP Pasal 16.1)

29 Korban perdagangan orang akan tetap berada dalam kondisi yang sangat rentan bila layanan yang mereka terima diberikan dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Pertimbangan bahasa dan budaya merupakan faktor yang sangat penting dalam penyediaan layanan dan pemberian informasi. Layanan yang diberikan serta staf penghubung yang berasal dari kelompok budaya dan linguistik yang sama dengan korban akan memberikan korban pemahaman yang lebih baik akan proses birokrasi yang harus mereka lalui. Dalam banyak contoh, mungkin menjadi yang hal penting untuk menyediakan layanan penerjemah berjenis kelamin yang sama dengan korban.

30 Menurut prinsip-prinsip 8 hingga 13 dari Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum 40/34, lampiran), kompensasi tersebut harus mencakup pengembalian properti atau pembayaran atas bahaya (harm) atau kerugian yang diderita, pengembalian atas pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan restorasi hak-hak korban. Ketika tidak ada kompensasi dari pihak pelaku atau sumber lainnya, Negara harus berupaya keras untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban, keluarga korban atau tanggungannya (bilamana korban meninggal dunia) lihat: [www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm](http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm) dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, *Rekomendasi Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang*. P11



## Contoh-contoh Internasional:

**Mencegah terjadinya viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana** - Ruang sidang dapat menjadi tempat yang menakutkan bagi korban. Pengadilan, prosedur dan persidangan perkara pidana dapat menjadi tempat yang formal dan kolot. Hakim memiliki peluang lebih baik untuk mengurangi rasa cemas korban bila hakim memahami bagaimana suasana yang sudah melembaga ini serta praktik-praktiknya telah berkontribusi terhadap kondisi tidak ramah yang dihadapi korban dan dimungkinkan korban dapat terpapar pada viktimisasi sekunder.

Tabel di bawah ini memberikan sebuah ringkasan akan sebagian faktor atau aspek formalitas dari persidangan pidana yang berkontribusi kepada kondisi yang tidak ramah terhadap korban. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa banyak faktor yang berkontribusi pada trauma yang dialami oleh korban adalah faktor yang kemungkinan besar tidak dapat dihindari, misalnya korban diwajibkan bercerita kepada orang yang tidak mereka kenal dengan baik atau bahkan tidak dikenal sama sekali, tentang detail kekerasan yang mereka alami. Pengacara pembela perlu untuk diberikan kesempatan melontarkan pertanyaan kepada pelapor. Tetapi, banyak dari kebiasaan persidangan atau aspek-aspek dari kebiasaan persidangan merupakan hal yang tidak dibutuhkan.

**Tabel faktor-faktor yang dapat menciptakan lingkungan ruang sidang yang tidak ramah<sup>31</sup>**

Aspek	Detail	Pertimbangan bagi hakim	Aspek	Detail	Pertimbangan bagi hakim
Formalitas kesopanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalitas kesopanan atau standar perilaku yang diharapkan dari saksi dan korban di persidangan menjadi batasan perilaku yang dapat diterima di ruang sidang.</li> <li>Semua peserta perkara di persidangan, termasuk korban, diharapkan agar menjalankan peran masing-masing sesuai kepatantasan, ketertiban, dan kesopanan.</li> <li>Meskipun korban kerap menjadi sasaran pertanyaan yang bersifat intim, menghina, dan agresif, ia diharapkan agar menggunakan bahasa yang baik dan benar, dengan intonasi suara dan tingkat emosi yang baik, dan rasa hormat terhadap hakim dan pengacara.</li> <li>Meskipun mungkin dihukum atas perlakuan tidak patut terhadap hakim atau pengacara lain, hakim dan pengacara biasanya tidak dihukum atas perilaku tidak patut terhadap saksi.</li> <li>Kredibilitas korban bergantung pada kesediaan dan kemampuannya menjalani proses. Contoh: "Seakan-akan mengikuti wacana publik yang berbeda, dan tanpa adanya kemarahan atau keengganan, terhadap pertanyaan yang sama yang diajukan berulang-ulang tentang berapa hari yang ia perlukan untuk dapat buang air besar setelah dipaksa berhubungan badan secara anal - Sepuluh kali ia menjawab pertanyaan ini."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hargai betapa besar kekuatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menahan diri agar tetap sopan saat menghadapi hinaan dan ketidaksopanan berkontribusi pada berulangnya reviktimisasi korban dalam sistem peradilan pidana.</li> <li>Pahami bahwa kewajiban bersikap sopan tidak menjadikan situasi adil bagi semuanya.</li> <li>Cegah pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang atau tidak relevan.</li> <li>Kendalikan pengajuan pertanyaan yang bersifat menghina dan fokus pada relevansi.</li> <li>Maklumi tindakan kurang sopan oleh korban tanpa menjadikannya sebagai salah satu faktor dalam mengukur kredibilitasnya.</li> <li>Konsepsi keharusan bersikap sopan yang lebih koheren dan tidak terlalu membeda-bedakan kelas sosial, menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab menjalankan proses sidang perkara pidana dengan baik - pengacara dan hakim harus berperilaku demikian terhadap seluruh peserta sidang.</li> </ul>	Ruang fisik dan estetika ruang sidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desain ruang persidangan menetapkan garis pandang tertentu yang membuat sebagian peserta lebih terlihat atau lebih terdengar dibandingkan peserta lain dan memfasilitasi garis hierarki keterlibatan yang membedakan antara profesional hukum dan orang awam.</li> <li>Hakim biasanya berdiri di meja hakim yang ditinggikan di bagian depan dan tengah ruang sidang, sehingga membantu mereka memegang kendali atas jalannya persidangan.</li> <li>Di banyak negara, ruang sidang dipisahkan secara fisik oleh sebuah palang - hanya praktisi hukum yang sudah dilantik resmi ("diundang ke persidangan") boleh duduk di bagian depan ruang sidang. Pihak lain, termasuk profesional bidang lain (seperti petugas sosial, profesional medis, petugas pendukung ruang sidang, magang hukum, dan paralegal), hanya diizinkan melintasi pembatas ini dalam keadaan tertentu dan jika diundang. Publik selalu berada di balik "palang".</li> <li>Biasanya, saksi diminta untuk berdiri saat memberikan kesaksian, sehingga dinamai "mimbar saksi". Saksi bisa saja harus berdiri selama berjam-jam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubah estetika ruang sidang.</li> <li>Pertimbangkan kembali desain fisik beberapa ruang sidang. Contohnya, atur kembali ruang sidang yang dirancah sedemikian rupa sehingga hakim pemeriksa fakta dapat secara memadai mendengar dan mengamati saksi dengan baik.</li> <li>Lepaskan simbol formal, seperti gaun dan/atau wig bagi para hakim dan pengacara.</li> <li>Izinkan saksi duduk selama memberikan kesaksian.</li> </ul>
Naskah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk komunikasi yang diterima dalam proses sidang adalah resmi, tertata sesuai naskah, dan kaku. Hakim dan pengacara menggunakan bahasa khusus.</li> <li>Ada aturan yang mengatur siapa yang boleh berbicara, kepada siapa, dan kapan.</li> <li>Kesaksian dari saksi harus diperoleh dalam format yang ketat dan sangat terstruktur.</li> <li>Bentuk komunikasi yang tertata sesuai naskah dalam sidang perkara secara eksplisit bersifat hierarki.</li> <li>Pengacara (dan hakim) mengajukan pertanyaan dan penggugat (dan saksi) menjawabnya - bukan sebaliknya. Contoh: "[Penggugat]: Apa hubungannya hal tersebut dengan sidang hari ini? [Pembela] Sesuai aturan, saya yang bertanya di sini..."</li> <li>Dengan format pemeriksaan silang (yang mencakup pertanyaan yang menggiring, pengulangan, dan desakan untuk suatu jawaban tertentu), pengacara pembela dapat memiliki kendali kuat terhadap kesaksian penggugat.</li> <li>Penggugat yang menyimpang dari naskah berisiko dianggap melanggar aturan atau bersikap tidak menghormati, sehingga dianggap tidak dapat dipercaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izinkan saksi mencari klarifikasi, menyatakan kekhawatiran, atau berkontribusi terhadap arah percakapan.</li> <li>Sadari adanya kemungkinan jawaban penggugat terdistorsi dalam upaya pembela mendesak untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan.</li> <li>Gunakan gaya interaksi yang lebih ramah dengan penggugat, dengan berinteraksi secara manusiawi.</li> <li>Menyimpang dari naskah dan izinkan pihak lain untuk juga menyimpang dari naskah.</li> <li>Sebelum mengizinkan penasih hukum terdakwa memulai pemeriksaan silang, pastikan ada rasa nyaman bagi penggugat, termasuk memastikan penggugat sudah diberi air minum dan tisu dan meminta penggugat agar memberi tahu persidangan jika butuh istirahat.</li> </ul>	Proses hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di beberapa negara yang pemeriksaan silangnya bisa berlangsung sehari-hari, saksi penggugat dilarang berbicara kepada siapa pun tentang kesaksian mereka di persidangan. Larangan ini tidak mengindahkan efek isolasi yang buruk yang membuat perempuan, yang mengalami insiden traumatis sehari-hari, tidak menerima dukungan dari konselor atau petugas kesehatan mental.</li> <li>Hal ini diperburuk oleh konsekuensi hukum jika tidak kembali ke persidangan, misalnya surat perintah pengadilan atas penangkapannya yang dapat dikeluarkan di beberapa yurisdiksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kembali apakah memang perlu melarang penggugat berkomunikasi dengan orang lain tentang pengalaman persidangan selama masa pemeriksaan ulang yang diperpanjang.</li> <li>Pertimbangkan bagaimana mereka dapat menerima jenis bantuan seperti ini tanpa berisiko mendistorsi kesaksian mereka.</li> </ul>
			Korban yang tidak siap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saksi/ korban penggugat seringkali tidak siap menjalani proses sidang perkara pidana.</li> <li>Secara umum, banyak korban yang tidak paham dengan bahasa khusus yang digunakan, peran para pihak di persidangan, prosedur di ruang persidangan, dan proses sidang suatu perkara.</li> <li>Banyak penggugat yang hadir ke persidangan tanpa pendampingan, tidak memiliki persiapan dasar seperti peninjauan kesaksian secara layak, dan tidak terbiasa dengan proses pengadilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertimbangkan langkah persiapan yang lebih baik dan mendukung saksi/ korban saat menghadapi dan menjalani proses persidangan pidana.</li> <li>Mengenalkan penggugat kepada konteks persidangan untuk mengurangi dampak terhadap gugatan baru yang muncul saat pelaksanaan sidang perkara.</li> <li>Praktik terbaik adalah memberikan pendampingan hukum bagi korban secara independen dan dibiayai negara.</li> </ul>

31 Elaine Craig, "The Inhospitable Court", *University of Toronto Law Journal*, vol. 66, No. 2 (2016).

Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang dapat mereka tempuh untuk meminimalisir dampak negatif dari praktik-praktik ritual yang dianggap tidak perlu.. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana hakim dapat membuat persidangan menjadi lebih ramah bagi pelapor tanpa mengancam hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Berikut beberapa contohnya:

**Informasi bagi korban** - Di Amerika Serikat, poster ini dipasang di gedung pengadilan, dan informasi rinci mengenai tata letak ruang sidang dan penjelasan singkat mengenai pihak-pihak kunci dan peran mereka dalam persidangan diberikan kepada saksi dan korban – Amerika Serikat.



**Informasi tentang Proses Sidang** - Informasi tentang proses sidang harus tersedia dalam berbagai format, misalnya, melalui video, pada laman pengadilan, media sosial, dan sebagainya, informasi juga perlu ada dalam bentuk cetak. Sering kali materi informasi dikembangkan bersama antara lembaga peradilan dengan Lembaga layanan pendamping korban. Materi cetak tersebut diberikan kepada lembaga layanan pendamping dan organisasi non-pemerintah, sehingga korban mempunyai informasi tentang proses persidangan pidana sejak awal. Informasi tersebut harus tersedia dalam berbagai format dan bahasa agar dapat memenuhi kebutuhan semua korban dan saksi.



**Video online tentang peran seorang saksi dalam sebuah perkara** dibuat oleh Pengadilan di Thailand untuk memberikan informasi bagi saksi dan sebagai upaya untuk mengurangi rasa takut yang mungkin mereka miliki bila hadir di pengadilan. Video ini dikirimkan melalui laman Facebook.<sup>32</sup>



**Informasi bagi korban kejahatan yang datang ke pengadilan - Perjalanan menuju Keadilan dibuat oleh Pengadilan New South Wales, Australia:** Rangkaian sepuluh (10) video pada YouTube<sup>33</sup> untuk membantu korban kejahatan saat hadir ke pengadilan di New South Wales, Australia. Video tersebut memperlihatkan tata letak pengadilan, video juga menjelaskan tentang proses persidangan dan konsep-konsep penting seperti bukti utama, pemeriksaan silang & pemeriksaan ulang.



**Kementerian Kehakiman (Inggris):** Melihat melalui mata seorang saksi, animasi ini menjelaskan apa saja yang mungkin dilalui dalam proses persidangan dan mengikuti perjalanan seorang perempuan muda mulai dari saat dia memberikan kesaksian, selama proses pengadilan pidana, dan setelah persidangan. Video tersebut juga menerangkan layanan khusus yang diberikan seperti ruang tunggu terpisah, bukti video, dukungan pendamping saksi /manajer kasus, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>



32 <https://www.facebook.com/watch/?v=261359598249050>

33 <https://www.youtube.com/watch?v=2tgMHIHyiuE>

34 <https://www.youtube.com/watch?v=t8qMFYI6Nm4>

## Informasi bagi saksi dan korban -

Datang ke pengadilan adalah hal yang sulit bagi saksi dan korban. Penting sekali agar mereka menerima segala informasi yang mereka butuhkan tentang proses pengadilan. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Keluarga Australia (*Federal Circuit and Family Court*) memberikan paket informasi bagi semua pencari keadilan yang tidak memiliki pendamping hukum. Dokumen tersebut (tersedia dalam beberapa bahasa) memberikan rincian tentang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi pengadilan, apa yang harus dikenakan, keselamatan pribadi, apa yang harus dilakukan ketika tiba di pengadilan, kata-kata yang umum yang dipakai di pengadilan, apa yang tidak boleh dilakukan di ruang sidang, dan bagaimana cara menyapa hakim. Paket informasi tersebut juga memuat informasi tentang di mana bisa mendapatkan akses untuk nasihat hukum gratis.<sup>35</sup>

**LEMBAR FAKTA**



## Menghadiri persidangan – kiat-kiat menghadapi sidang pengadilan

Lembar fakta ini dibuat untuk orang-orang yang mewakili dirinya sendiri dalam persidangan. Lembar fakta ini mencakup beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang pengadilan, serta hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di dalam ruang sidang.

**Persiapan**

Bersiaplah menghadiri perkara Anda pada hari sidang pengadilan. Lakukan riset sebanyak mungkin dan kumpulkan semua informasi untuk perkara Anda. Pastikan semua dokumen Anda tersusun rapi dan tandai dokumen yang sudah diserahkan kepada Pengadilan. Jangan lupa bawa alat tulis dan buku catatan.

Sebagian orang merasa ada baiknya duduk terlebih dahulu di ruang sidang sebelum persidangan dimulai jika belum pernah menghadiri persidangan sebelumnya. Kebanyakan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka, sehingga Anda dapat melakukan hal ini kapan saja.

**Pakaian**

Tidak ada peraturan khusus tentang pakaian di persidangan. Namun, persidangan merupakan tempat resmi dan sebaiknya gunakan pakaian yang sesuai.

**Anak-anak di persidangan**

Umumnya, persidangan bukanlah tempat yang sesuai bagi anak-anak. Tanyakan anak Anda jika Anda akan menghadiri persidangan.

Jika anak Anda harus menghadiri persidangan untuk berbicara kepada pakar anak atau petugas peradilan, tanyakan kepada staf pengadilan sebelum jadwal persidangan Anda, apakah diperlukan pengaturan pengitipan untuk anak Anda pada hari persidangan tersebut.

**Keselamatan pribadi**

Jika Anda merasa khawatir akan keselamatan diri selama menghadiri persidangan, hubungi 1300 352 000 sebelum jadwal persidangan Anda. Opsi keselamatan Anda di persidangan akan didiskusikan dan jadwal akan disiapkan. Lihat lembar fakta, apakah Anda merasa khawatir atas keselamatan Anda saat menghadiri persidangan?

**Hadir di persidangan**

Anda dapat mengkonfirmasi lokasi pendaftaran Persidangan dengan membuka [www.fcfa.gov.au/court-locations](http://www.fcfa.gov.au/court-locations). Anda harus hadir paling lambat 30 menit sebelumnya agar memiliki cukup waktu untuk melewati prosedur keamanan dan mencari ruang sidang. Jika Anda menghadapi masalah saat mencari ruang sidang, tanyakan kepada aparat pengadilan.

Di kebanyakan lokasi persidangan, ada pengacara piket yang tersedia untuk membantu Anda pada hari persidangan. Bantuan yang diberikan pengacara piket bersifat terbatas dan Anda harus mengikuti pedoman tertentu agar memenuhi syarat menerima bantuan hukum.

Anda dapat membawa anggota keluarga atau teman (yang berusia di atas 18 tahun) untuk duduk bersama Anda dan memberikan dukungan. Apabila tidak disetujui oleh petugas peradilan, orang yang mendampingi tersebut tidak dapat duduk bersama Anda di meja persidangan dan berbicara mewakili Anda. Tidak diperbolehkan ada alat perekam di ruang sidang tanpa seizin petugas pengadilan.

Sebelum memasuki ruang sidang, Anda harus:

- menonaktifkan peralatan elektronik, termasuk ponsel, dan
- melepaskan topi atau kacamata hitam, kecuali untuk alasan medis atau agama.

Jangan membawa makanan atau minuman ke dalam ruang sidang.

**Skema Tunjangan Saksi (dukungan keuangan) -** Pengadilan Singapura, melalui laman publik mereka, memberikan keterangan rinci tentang kompensasi keuangan bagi saksi. Informasi tersebut dilengkapi dengan sebuah daftar tilik dan penjelasan bagaimana caranya melakukan pengajuan kompensasi.<sup>36</sup> Formulirnya sangat sederhana untuk diisi, jaksa dan pengacara pembela juga memberikan saran serta membantu saksi mereka untuk membuat pengajuan tunjangan

### TUNJANGAN SAKSI OLEH JAKSA PENUNTUT

Harap perhatikan bahwa saksi harus menerima surat panggilan menghadiri proses persidangan dari Pengadilan Negeri agar memenuhi syarat menerima Tunjangan Saksi. Bagi Saksi Lokal, lihat Bagian 2 untuk mengklaim Tunjangan Saksi. Bagi Saksi Asing, lihat Bagian 1 & 2 untuk mengklaim Tunjangan Saksi.

#### Bagian 1 | Sebelum Sidang Perkara: Khusus Saksi Asing

Surat permohonan harus diserahkan oleh Petugas Penyidik/Jaksa Penuntut ke bagian Keuangan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal sidang perkara.

- PENGISIAN SURAT PERMOHONAN**  
Petugas Penyidik (Investigation Officer atau IO) atau Jaksa Penuntut melengkapi Formulir Permohonan bagi Saksi Asing (**Formulir W2**) dan menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan.\* Deputy Jaksa Penuntut Umum (Deputy Public Prosecutor atau DPP) menyetujui **Formulir W2** sebelum diserahkan.  
\*Formulir dan daftar dokumen pendukung dapat diunduh di bawah.
- PENYERAHAN SURAT PERMOHONAN**  
IO atau Jaksa Penuntut menyerahkan **Formulir W2** dan dokumen pendukung yang diperlukan ke bagian Keuangan melalui [contact@statecourts.gov.sg](mailto:contact@statecourts.gov.sg)
- PEMROSESAN SURAT PERMOHONAN**  
Bagian Keuangan memproses permohonan.
- HASIL SURAT PERMOHONAN**  
a) Jika permohonan disetujui: Bagian Keuangan menginformasikan nilai yang disetujui kepada IO atau Jaksa Penuntut.  
b) Jika permohonan ditolak: Bagian Keuangan menginformasikan kepada IO atau Jaksa Penuntut bahwa permohonan ditolak.

#### Bagian 2 | Setelah Sidang Perkara: Bagi Saksi Lokal dan Asing

Aturan (10) Peraturan menerangkan bahwa formulir klaim dan dokumen pendukung harus diserahkan kepada pengadilan paling lambat 2 bulan setelah akrual klaim (yakni tanggal hari terakhir kehadiran saksi pada persidangan).

- PERMOHONAN KLAIM**  
a) Bagi Saksi Lokal: Saksi melengkapi Formulir Klaim Tunjangan Saksi Lokal (**Formulir W1**) dan menyerahkan **Formulir W1** beserta dokumen pendukung\* kepada IO atau Jaksa Penuntut (Petugas Sertifikasi).  
b) Bagi Saksi Asing: Saksi melengkapi Formulir Klaim Tunjangan Saksi Asing (**Formulir W3**) dan menyerahkan **Formulir W3** beserta dokumen pendukung\* kepada IO atau Jaksa Penuntut (Petugas Sertifikasi).  
\*Formulir dan daftar dokumen pendukung dapat diunduh di bawah.
- SERTIFIKASI KLAIM**  
IO atau Jaksa Penuntut memberikan sertifikasi atas formulir klaim dan dokumen pendukung.
- PENYERAHAN KLAIM**  
a) Jika perkara didaftarkan pada "sistem terintegrasi manajemen perkara" atau *The Integrated Case Management System* (ICMS): IO atau Jaksa Penuntut menyerahkan klaim pada ICMS kepada Hakim Sidang Perkara untuk mendapatkan persetujuan, beserta dokumen pendukung.  
b) Jika perkara tidak didaftarkan pada ICMS: IO/Jaksa Penuntut menyerahkan klaim kepada Aparat Pengadilan yang relevan, yang nantinya akan meneruskan klaim tersebut kepada Hakim Sidang Perkara untuk mendapatkan persetujuan.
- PERSETUJUAN KLAIM**  
Hakim Sidang Perkara meninjau klaim.
- HASIL KLAIM**  
a) Jika klaim disetujui: Bagian Keuangan memproses klaim dan mentransfer nilai yang disetujui ke rekening bank yang tercantum dalam formulir klaim.  
b) Jika klaim ditolak: Bagian Keuangan atau Petugas Pengadilan menginformasikan kepada IO atau Jaksa Penuntut bahwa klaim ditolak.

### TUNJANGAN SAKSI OLEH PEMBELA

Harap perhatikan bahwa saksi harus menerima surat panggilan menghadiri proses persidangan dari Pengadilan Negeri agar memenuhi syarat menerima Tunjangan Saksi. Bagi Saksi Lokal, lihat Bagian 2 untuk mengklaim Tunjangan Saksi. Bagi Saksi Asing, lihat Bagian 1 & 2 untuk mengklaim Tunjangan Saksi.

#### Bagian 1 | Sebelum Sidang Perkara: Khusus Saksi Asing

Surat permohonan harus diserahkan oleh Petugas Penyidik/Jaksa Penuntut ke bagian Keuangan paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal sidang perkara.

- PENYERAHAN SURAT PERMOHONAN**  
Perasah Hakim Terbakwa (Defense Counsel atau DC) melengkapi Formulir Permohonan untuk Saksi Asing (**Formulir W2**) dan menyerahkan **Formulir W2** beserta dokumen pendukung yang diperlukan ke bagian Keuangan melalui [contact@statecourts.gov.sg](mailto:contact@statecourts.gov.sg)  
\*Formulir dan daftar dokumen pendukung dapat diunduh di bawah.
- PEMROSESAN SURAT PERMOHONAN**  
Bagian Keuangan memproses permohonan.
- HASIL SURAT PERMOHONAN**  
a) Jika permohonan disetujui: Bagian Keuangan menginformasikan nilai yang disetujui kepada DC.  
b) Jika permohonan ditolak: Bagian Keuangan menginformasikan kepada DC bahwa permohonan ditolak.

#### Bagian 2 | Setelah Sidang Perkara: Bagi Saksi Lokal dan Asing

Aturan (10) Peraturan menerangkan bahwa formulir klaim dan dokumen pendukung harus diserahkan kepada pengadilan paling lambat 2 bulan setelah akrual klaim (yakni tanggal hari terakhir kehadiran saksi pada persidangan).

- PERMOHONAN KLAIM**  
a) Bagi Saksi Lokal: Saksi melengkapi Formulir Klaim Tunjangan Saksi Lokal (**Formulir W1**) dan menyerahkan **Formulir W1** beserta dokumen pendukung\* kepada DC (Petugas Verifikasi).  
b) Bagi Saksi Asing: Saksi melengkapi Formulir Klaim Tunjangan Saksi Asing (**Formulir W3**) dan menyerahkan **Formulir W3** beserta dokumen pendukung\* kepada DC (Petugas Verifikasi).  
\*Formulir dan daftar dokumen pendukung dapat diunduh di bawah.
- VERIFIKASI KLAIM**  
DC melakukan verifikasi dan menyerahkan formulir klaim beserta dokumen pendukung kepada Petugas Pengadilan yang relevan.
- SERTIFIKASI KLAIM**  
Petugas Pengadilan memberikan sertifikasi dan menyerahkan klaim kepada Hakim Sidang Perkara untuk mendapatkan persetujuan.
- PERSETUJUAN KLAIM**  
Hakim Sidang Perkara meninjau klaim.
- HASIL KLAIM**  
a) Jika klaim disetujui: Bagian Keuangan memproses klaim dan mentransfer nilai yang disetujui ke rekening bank yang tercantum dalam formulir klaim.  
b) Jika klaim ditolak: Bagian Keuangan menginformasikan kepada DC bahwa klaim ditolak.

35 <https://www.fcfa.gov.au/sites/default/files/2021-08/Going-to-court-tips-for-your-court-hearing-0921V1.pdf>

36 [https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/witnesses\\_allowances\\_flowchart.pdf](https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/witnesses_allowances_flowchart.pdf)



**Permohonan Kompensasi** - Pusat Keadilan Komunitas Singapura mendukung Pengadilan Singapura dengan cara membantu korban kejahatan untuk membuat pengajuan kompensasi melalui *Skema Bantuan Korban*. Laman mereka menguraikan siapa saja yang berhak mengajukan, bagaimana cara mengajukannya dan, informasi tentang pencairannya.<sup>37</sup>

**Restitusi bagi Korban** - Di British Columbia, Kanada, laman pemerintahnya memberikan informasi bagi korban tentang (1) bagaimana caranya mengajukan restitusi; (2) kapan mengajukannya; (3) apa saja kerugian dan kerusakan yang layak mendapatkan kompensasi; (4) Informasi tentang apa yang akan mereka terima dan (5) apa yang harus dilakukan bila terpidana tidak membayar. Laman tersebut juga memberikan tautan ke pendaftaran pengajuan serta informasi lebih lanjut.<sup>38</sup>

The screenshot shows the 'Victim Restitution' page on the British Columbia government website. The page includes a navigation menu, a breadcrumb trail, and a sidebar with various links. The main content area is titled 'Victim Restitution' and contains a warning banner, an introduction to the program, and detailed information on how to request restitution. A sidebar on the right provides contact information for the Restitution Program and a list of related links.

**BRITISH COLUMBIA**

Home > Law, crime and justice > Criminal justice > B.C.'s criminal justice system > If You Are a Victim of a Crime > Victim of Crime >

**Victim Restitution**

**Use this banner to exit this site quickly.**

When a victim experiences a financial loss or damage, such as property damage, as a result of a crime, they have the right to have the court consider making a stand-alone restitution order at sentencing under section 738 or 739 of the Criminal Code.

Restitution *may* be ordered by the criminal court judge once an offender has been found guilty. The judge can order restitution in different ways – either as a condition of an offender's probation or conditional sentence, or as a stand-alone restitution order, enforceable by the victim in civil court if the restitution is not paid.

This page provides information on requesting and receiving restitution and also provides details on how the Restitution Program can be of assistance.

**Requesting restitution**

**How does a victim request restitution?**

A victim can advise the police at the time of the investigation about the financial losses or damages they have suffered. Where criminal charges are approved, a victim may request restitution by completing a [Statement on Restitution form \(Form 34.1\)](#):

- In many cases Crown Counsel offices will mail the Statement on Restitution form to victims along with a Victim Impact Statement form after charges are approved
- A Victim Impact Statement is a written description of how a crime has affected the victim and is considered by the court at sentencing if the accused is found guilty or pleads guilty, however restitution can only be requested by completing the Statement on Restitution form
- [Victim service workers](#) can assist victims in completing both the Statement on Restitution form and the Victim Impact Statement

For the courts to consider making a restitution order, the victim's financial losses or damages that he or she has suffered as a result of the crime must be "readily ascertainable" or easily determined:

- Victims must be able to clearly document their losses and damages and must submit supporting documents with their Statement on Restitution
- It is important to include with the Statement on Restitution supporting documents such as copies of any relevant bills, receipts, invoices, estimates, etc. These types of documents

**Restitution Program Contact Information**

Restitution Program  
Ministry of Public Safety & Solicitor General  
PO Box 5550 Station Terminal  
Vancouver, B.C. V6B 1H1

Lower Mainland: 604-660-4898  
Toll Free: 1-844-660-4898  
Fax: 604-660-5340

[Email](#)

**Related Links**

- [Statement on Restitution](#)
- [Victim Impact Statement](#)
- [Community Impact Statement Program](#)
- [Small Claims Court](#)
- [Supreme Court of BC](#)
- [Department of Justice Canada - Restitution Orders](#)
- [VictimLinkBC](#)
- [Victim Services & Violence Against Women Program Directory](#)
- [Publications for Victims of Crime](#)
- [Information and Resources for Service Providers](#)

**Criminal Justice Glossary**

Check our alphabetical list of [criminal justice terms](#) along with their definitions.

37 <https://www.cjc.org.sg/services/social-support/victim-assistance-scheme/>

38 <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-restitution>

**Nasihat hukum gratis bagi korban dan saksi** - Di banyak negara, nasihat dan pendampingan hukum gratis diberikan kepada korban kejahatan. Nasihat hukum ini dapat membantu korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.<sup>39</sup> Sering kali, layanan bantuan hukum gratis ini ditawarkan oleh para pengacara independen yang berkantor berdampingan dengan gedung pengadilan. Di Sydney, Australia, Bantuan Hukum NSW memberikan nasihat dan pendampingan hukum gratis kepada korban kejahatan kekerasan.

Departemen Kejaksaan dan Kehakiman di NSW, Australia, memberikan layanan bantuan korban berupa pendampingan, informasi, rujukan, konseling, dan layanan kompensasi kepada saksi dan korban kekerasan. Mereka juga menyediakan informasi yang sangat jelas pada laman mereka tentang apa saja yang tersedia bagi korban kejahatan (lihat di bawah ini).<sup>40</sup>

**What can I get help with?**

The table summarises the different types of supports that you may get and what information we need from you for each support type.

Purpose	Benefits	Who is eligible to apply?	What information do I need to give?	How long do you have to claim?
<b>Type of help: Counselling</b>				
To help in your recovery	Up to 22 hours of counselling and more for some victims	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary victims</li> <li>Secondary victims</li> <li>Family victims</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application form</li> <li>Government issued ID</li> </ul>	No time limit
<b>Type of help: Financial assistance for immediate needs</b>				
To help pay for things you need urgently to be safe and healthy because of the violent crime	You may get up to \$5,000 to help pay for: <ul style="list-style-type: none"> <li>changing the locks on your doors</li> <li>moving house</li> <li>putting an alarm in your home</li> <li>emergency doctor, dentist and other medical bills</li> <li>crime scene clean up</li> </ul> You may get up to \$9,500 to help pay for the funeral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primary victims</li> <li>Parents, step-parents and guardians</li> <li>Family victims</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application form</li> <li>Government issued ID</li> <li>Police* or government/government-funded organisation report, or a medical report that provides details about what happened and shows how the violent crime has affected you (not required for family victims)</li> <li>Copies of tax invoices, receipts or treatment plans of costs you are claiming</li> <li>A description of how each cost relates directly to the violent crime</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Within 2 years from the violent crime*</li> <li>For children, within 2 years of turning 18</li> </ul>

**Nasihat hukum gratis untuk saksi dan korban** - Di banyak negara, seperti Vietnam, nasihat dan bantuan hukum gratis diberikan kepada korban kejahatan. Nasihat hukum ini dapat diperluas untuk membantu korban dalam rangka menuntut kompensasi dan restitusi. Nasihat hukum gratis di Vietnam tersedia dari berbagai organisasi bantuan hukum, dan jika seorang saksi belum menerima nasihat hukum, hakim sering mengarahkan korban ke layanan yang sesuai untuk memastikan mereka dapat mengakses hak-hak mereka sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

39 Nasihat hukum harus disediakan sebagai bagian dari dukungan terpadu yang ditawarkan untuk program bantuan korban. Karena banyak korban perdagangan orang yang merasa takut terhadap pemerintah dan otoritas birokratis, penyediaan bantuan dan pendampingan hukum merupakan hal yang sangat penting. Pemupukan hubungan yang erat antara organisasi non-pemerintah yang menyediakan bantuan hukum dengan lembaga penegakan hukum dapat sangat membantu perlindungan terhadap korban dan hak-hak mereka. Pembentukan protokol formal dan informal serta prosedur antara kedua lembaga ini harus menjadi bagian dari setiap strategi bantuan korban terpadu.

40 [https://static1.squarespace.com/static/60c04522c28dde76edfa63a3/t/60fe3f9ab2fdf61c00407ce9/1627275162746/Victim\\_s+Support+Scheme.pdf](https://static1.squarespace.com/static/60c04522c28dde76edfa63a3/t/60fe3f9ab2fdf61c00407ce9/1627275162746/Victim_s+Support+Scheme.pdf)

INDIKATOR

5

Pemulihan fisik,  
psikologis & sosial  
korban



## Indikator 5: Indikator yang terkait dengan langkah-langkah yang tersedia bagi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban perdagangan orang

### Ringkasan

Saksi dan Korban mungkin memerlukan layanan dan dukungan khusus, baik materi maupun psikologis. Layanan yang efektif bagi korban perdagangan orang bertumpu pada ragam penyedia layanan yang bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik guna memenuhi kebutuhan khusus dari korban, termasuk layanan nasihat hukum.

Pendekatan yang berorientasi pada korban dari Konvensi ASEAN (ACTIP) hanya dapat dipenuhi melalui kerja sama multipihak, misalnya seperti tertera pada Mekanisme Rujukan Nasional, yang melibatkan serangkaian aktor pemerintah dan non-pemerintah bekerja sama secara terkoordinasi guna memastikan bahwa semua korban, terlepas dari lembaga mana pun yang mengidentifikasi mereka, korban mempunyai akses ke bantuan, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka secara efektif terpenuhi.

Karena kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, maka personil organisasi non-pemerintahlah yang dapat membangun hubungan dengan korban perdagangan orang. Organisasi non-pemerintah memiliki keterampilan dan pengalaman khusus untuk menangani, memberikan konseling, dan mengakomodir korban yang diminta oleh penyidik untuk menjadi saksi.

Pengalaman dari berbagai negara memperlihatkan bahwa penuntutan hukum yang sukses melawan pelaku perdagangan orang bertumpu pada ikatan yang kuat dan hubungan yang baik antar lembaga penegak hukum dan penyedia layanan. Pengalaman tersebut juga memperlihatkan bahwa perjanjian kerjasama antara stakeholder pemerintah dan non pemerintah menaikkan tingkat keberhasilan penuntutan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Protokol formal dan memorandum kesepahaman antar lembaga memberikan sebuah landasan yang kokoh sebagai tempat bertumpu bagi kolaborasi multi-lembaga ini.<sup>41</sup>

Sistem keadilan yang dikelola dengan baik mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoordinasi tanggapan terhadap perkara TPPO, dan Pengadilan dapat menjalankan inisiatif dan reformasi melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil tanpa menimbulkan risiko terhadap kemandirian mereka. Dengan bekerja secara terkoordinasi dan kolaboratif, pengadilan dapat memberikan layanan yang cepat tanggap dan efektif guna memenuhi kebutuhan para korban dengan menyediakan akses 'paripurna' atau layanan 'satu pintu'.

41 Untuk informasi tambahan tentang MOU/perjanjian, lihat *the United Kingdom Home Office Crime Reduction Toolkit on trafficking in people yang tersedia pada*: [www.crimereduction.gov.uk/toolkits/tp00.htm](http://www.crimereduction.gov.uk/toolkits/tp00.htm) dan *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons; A Practical Handbook* (Warsaw, OSCE, 2004), tersedia pada: [www.osce.org/publications/odhr/2004/05/12351\\_131\\_en.pdf](http://www.osce.org/publications/odhr/2004/05/12351_131_en.pdf)



## Prinsip

*Apa yang harus diimplementasikan?*

- 5.1 Perlu adanya Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian antara Pengadilan dan organisasi masyarakat sipil/non-pemerintah (Ornop) untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi penyediaan layanan dan dukungan bagi korban TPPO. (Art. 14.10 (b)(c)).
- 5.2 Perlu adanya Protokol antarlembaga untuk layanan 'paripurna' atau layanan 'satu pintu' yang terkoordinasi bagi korban TPPO sehubungan dengan program-program konseling, medis, akomodasi, pendidikan dan pelatihan, dokumen hukum dan perlindungan sosial yang lebih luas (Art. 14.10 (b)(c)).



## Contoh-contoh Internasional:

**Hubungan Pengadilan dengan Organisasi Non Pemerintah (Ornop)** - Pengadilan Negeri di Singapura, memiliki hubungan dengan sebuah Ornop, Layanan Sosial Informasi Hukum (*Legal information of Social Services (LinKS)*) untuk menyediakan konseling, rujukan, dan nasihat untuk dukungan bagi perempuan, anak dan keluarga yang terdampak oleh berbagai permasalahan.. Membuat sebuah laman Pengadilan dengan tautan ke Ornop yang dapat membantu korban dan saksi untuk mengakses layanan yang tidak dapat diberikan oleh Pengadilan seperti konseling, bantuan finansial, dan bantuan hukum. Sebuah nota kesepahaman (MOU) dapat menetapkan parameter dukungan apa saja yang disediakan oleh Ornop dan mengatur bagaimana kedua organisasi akan bekerja sama<sup>42</sup>

Legal Information and Knowledge of Social Services (LinKS)

Victim Assistance Scheme

Support for Families of Incarcerated Person

One of the key objectives of the CJC is to ensure that effective steps are taken to resolve what appear to be purely legal problems before they spiral into community and social issues that may impact the litigant, his/her family and even the community at large as well. For example, children from a divorced family may require financial support when the parent responsible for maintenance payment defaulted.

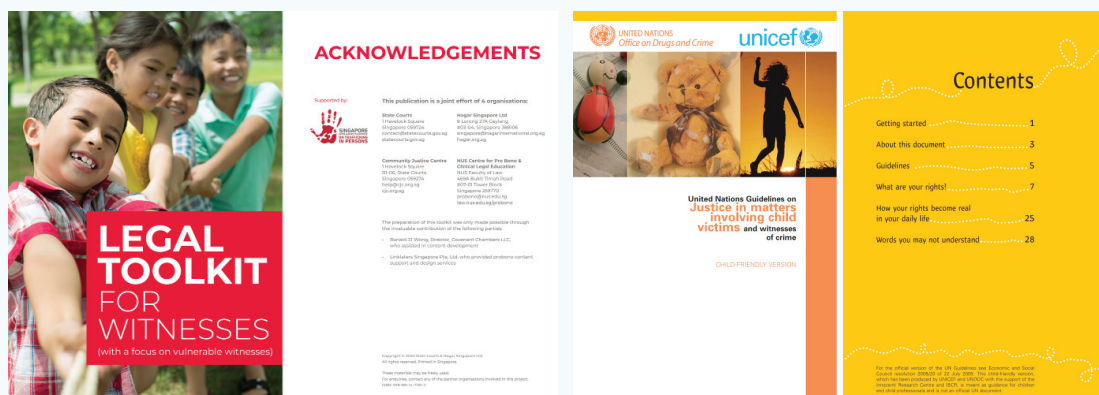
At LinKS, we take on a multi-faceted approach to understand the situation of every client and to alleviate their financial and emotional stress, as they prepare themselves for court hearings. We work in close partnership with stakeholders to provide the following types of assistance to needy LIPs:

42 <https://www.cjc.org.sg/services/social-support/legal-information-and-knowledge-of-social-services-links/>



**Kemitraan dengan Ornop** - Pengadilan Negeri di Singapura bersama dengan Ornop dan organisasi masyarakat sipil menyusun sebuah 'Alat Bantu bagi Saksi' untuk mendampingi saksi dalam mempersiapkan dirinya menghadapi persidangan.<sup>43</sup>

**Materi yang didesain secara khusus bagi saksi dan korban anak** - Pedoman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Keadilan dalam perkara yang melibatkan saksi dan korban anak (*The United Nations Guidelines on Justice in matters involving child victims and witnesses of crime*) (*versi ramah anak*)<sup>44</sup> menjelaskan dalam bahasa yang sederhana dan sesuai untuk anak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana harus bertindak dalam situasi tertentu untuk memastikan bahwa anak yang telah dirugikan oleh tindak kejahatan dan anak yang melihat orang lain dirugikan, dapat terlindungi dan diperlakukan secara adil ketika mereka menceritakan kesaksian mereka di pengadilan. Dokumen tersebut juga membantu melindungi anak ketika mereka berbicara kepada polisi, pengacara, pekerja sosial, dan siapa pun yang mereka temui sebelum dan setelah mereka datang ke pengadilan.



**Dukungan terhadap Korban** - Di New South Wales, Australia, Dukungan Pengadilan bagi saksi dan korban Kejahatan (*In New South Wales, Australia the Victims & Witnesses of Crime Court Support (VWCCS)*) didirikan untuk menginformasikan dan mendukung saksi dan korban kejahatan ketika memberikan kesaksian di pengadilan NSW. Organisasi non-pemerintah, dijalankan oleh para sukarelawan terlatih, bekerja sama dengan individu dan lembaga (termasuk Pengadilan), dan semua layanan yang diberikan tersebut gratis. Mereka menjangkau korban kejahatan melalui laman Facebook, juga melalui rujukan langsung dari jaksa dan pengadilan.<sup>45</sup>



43 <https://law1.nus.edu.sg/cpbcle/pdfs/legaltoolkitforwitnesses2020.pdf>

44 [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Guidelines\\_E.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_E.pdf)

45 <https://www.vwccs.org.au>

## INDIKATOR

# 6

### Layanan medis & forensik



## Indikator 6: Indikator terkait dengan penyediaan layanan medis dan forensik bagi korban perdagangan orang

### Ringkasan

Banyak korban perdagangan orang memiliki kebutuhan medis yang harus dipenuhi. Mereka mungkin memiliki cedera fisik atau terpapar pada risiko penyakit. Mereka pun mungkin dipaksa menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk mengendalikan mereka atau memiliki ketergantungan obat-obatan sebagai cara mengatasi situasi perdagangan yang mereka alami. Sebagian korban mungkin memiliki masalah kesehatan mental terkait dengan trauma yang diderita akibat perdagangan orang yang dialaminya. Sementara lainnya mungkin mendapatkan masalah kesehatan seksual akibat praktik seksual yang tidak aman dan menggunakan kekerasan, termasuk meningkatnya risiko tertular HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pemeriksaan medis dan diskusi awal sebaiknya dilakukan dengan bermitra bersama organisasi non-pemerintah yang tepat, yang dapat menyediakan seorang pendamping dan juru bahasa (bila dibutuhkan) kepada korban perdagangan orang. Pemeriksaan ini harus memastikan bahwa semua cedera diidentifikasi, bukti yang tepat dikumpulkan dan terdapat rencana perawatan termasuk konseling paska tes kesehatan uji dilakukan. Bukti forensik hanya boleh diambil apabila hal tersebut akan membantu perkara dan diambil atas persetujuan aktif dari korban.

Bagi Pengadilan dan hakim, penting sekali bahwa mereka memahami reliabilitas dan validitas dari bukti ilmiah. Hakim perlu memiliki pemahaman akan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation - WHO) dalam melakukan pengumpulan bukti forensik yang benar dan memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli yang tepat. Para hakim, polisi, dan jaksa harus menjalani pelatihan dari tenaga ahli medis dan forensik yang memenuhi syarat mengenai persyaratan dan pembatasan jenis bukti ini.<sup>46</sup>



### Prinsip

*Apa yang harus diimplementasikan?*

- 6.1.** Jaksa dan hakim menerima pelatihan khusus tentang kekuatan dan kelemahan dari bukti-bukti forensik terkait dengan kekerasan seksual dan fisik (ATIP Pasal 16.1 & 16.6).
- 6.2.** Terdapat protokol nasional untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kekerasan seksual dan dibuat berdasarkan pedoman WHO.
- 6.3.** Pertukaran informasi resmi setiap tahun antar lembaga TPPO regional dan lembaga spesialis forensik di kawasan ASEAN dalam rangka mengembangkan keahlian dan memupuk kolaborasi regional (ACTIP Pasal 12 (g)).

<sup>46</sup> Lihat juga Pedoman WHO untuk Perawatan Medis-Legal bagi Korban Kekerasan Seksual (WHO *Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence*) at: [www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/publications/violence/med\\_leg\\_guidelines/en/](http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/)



## Contoh-contoh Internasional:

ASEAN ACT mengadakan seminar online untuk memperkenalkan kepada para hakim dan jaksa, hal-hal terkait persyaratan dan pembatasan obat-obatan forensik. Associate Professor, Dr. David Wells dari Victoria Australia Institute of Forensic Medicine menyampaikan sebuah paparan mendalam tentang perawatan dan layanan yang dibutuhkan dalam bidang ini.<sup>47</sup>



Di Filipina, Tata Kelola Peradilan (Governance in Justice) (GOJUST) membuat sebuah **Manual Forensik** tempat kejadian perkara umum<sup>48</sup> dan menyelenggarakan pelatihan forensik bagi hakim, jaksa, dan pengacara umum yang menyediakan landasan informasi mengenai topik ini.



47 <https://www.youtube.com/watch?v=506AhUYtr7g>

48 [The Forensic Manual can be downloaded from: https://www.scribd.com/document/431951965/Forensics-Manual](https://www.scribd.com/document/431951965/Forensics-Manual)



## INDIKATOR

# 7

Layanan khusus  
bagi anak



## Indikator 7: Indikator-indikator khusus, yang secara khusus terkait dengan anak sebagai saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang

### Ringkasan

Anak didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak<sup>49</sup> Kerugian fisik, psikologis, dan psikososial tertentu yang diderita oleh anak yang menjadi korban perdagangan orang serta meningkatnya kerentanan mereka terhadap eksploitasi memerlukan penanganan yang dilakukan secara terpisah dari korban perdagangan orang dewasa dari segi peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan intervensi serta kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan yang ditempuh untuk anak korban perdagangan orang.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kemungkinan lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya untuk mengalami kekerasan atau kesulitan. Studi menunjukkan bahwa anak yang berada dalam sistem peradilan telah menjadi korban melalui kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang dilakukan oleh berbagai aktor berbeda dalam sistem peradilan (termasuk oleh polisi dan petugas lembaga pemasyarakatan), juga oleh para tahanan dewasa di pusat tahanan. Trauma yang mereka derita dapat mengakibatkan bahaya jangka panjang terhadap seorang anak, termasuk bahaya terhadap tumbuh kembang mereka, harga diri, dan masa depan mereka.

Korban dan saksi anak yang berhadapan dengan hukum mungkin merasakan kecemasan melihat tampilan pengadilan dan takut menghadapi atau disakiti oleh terdakwa, malu bila menangis atau tidak dapat menjawab pertanyaan. Mereka sering mengalami reviktimisasi dan kembali trauma oleh sistem keadilan yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk menangani situasi dan prosedurnya dengan benar.

Layanan dan praktik peradilan yang peka terhadap anak sangat penting untuk melindungi anak yang berada dalam situasi rentan, mendukung mereka untuk memahami dan mengelola emosi, mencegah (dan/atau merespons) konflik dan kekerasan serta memberikan mereka sebuah ruang aman untuk mengungkapkan dirinya dan didengarkan ketika mereka menghadapi persoalan yang relevan bagi dirinya, termasuk sebagai korban atau saksi.

Pedoman, kebijakan, kampanye kesadaran, dan mekanisme usaha perlindungan lainnya di dalam sistem peradilan pidana, perlu dibentuk guna mencegah, mendeteksi, mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani secara aman perkara kejahatan terhadap anak.

49 Pasal 2(d) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP)

Anak adalah individu yang rentan dan perlu perlindungan khusus, bantuan, dan dukungan yang sesuai dengan usia mereka, tingkat kedewasaan dan kebutuhan uniknya agar mencegah kesulitan dan trauma lebih lanjut yang mungkin muncul dari partisipasi mereka dalam proses peradilan pidana. Anak korban perdagangan orang harus diberikan bantuan dan perlindungan yang tepatserta mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan khusus mereka secara utuh.

Pengadilan perlu menerapkan sebuah pendekatan yang berorientasi pada korban, peka terhadap usia anak,<sup>50</sup> keinginan, pemahaman, gender, orientasi seksual, etnis, budaya, agama, linguistik, dan latar belakang sosial mereka, kasta, kondisi sosial ekonomi dan status imigrasi atau status pengungsi mereka, disamping kebutuhan khusus anak, termasuk kesehatan, kemampuan dan kapasitas. Tenaga ahli perlu untuk dilatih dan diberikan edukasi mengenai perbedaan tersebut.<sup>51</sup>

Korban anak harus mendapatkan informasi lengkap mengenai proses peradilan pidana, status perkara dan berhak mengungkapkan pandangannya secara bebas dalam segala perkara yang menyangkut dirinya. Pengadilan harus menyambut partisipasi anak yang menyampaikan pandangannya dan menghormati keputusan mereka untuk turut serta atau tidak dalam proses peradilan pidana.

Di samping indikator-indikator yang tercantum dalam Indikator 2 & 4, Pengadilan harus, bila dapat diterapkan dan memungkinkan, memberikan perlindungan esensial kepada korban anak dengan mengizinkan anak untuk bersaksi melalui televisi sirkuit tertutup atau melalui mediator, membuat ruang sidang dan prosedur sidang menjadi lebih ramah terhadap anak dan memberikan instruksi kepada jaksa penuntut dan pembela untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan turut mempertimbangkan usia dan kebutuhan khusus anak guna menghindari risiko reviktimisasi.<sup>52</sup>



## Prinsip

### *Apa yang harus diimplementasikan?*

- 7.1. Pengadilan harus memberikan pengamanan bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, atau sebagai pelaku kejahatan, dengan cara:
  - a. memastikan adanya langkah-langkah untuk meminimalkan penundaan dalam proses peradilan pidana (ACTIP Pasal 16.3)
  - b. melindungi privasi anak dengan melarang pengidentifikasian saksi/korban anak atau anak sebagai pelaku kejahatan. (ACTIP Pasal 14.5; 14.6 & 16.7)
  - c. senantiasa memberi tahu anak tentang peran mereka dan cakupan, waktu serta perkembangan persidangan (ACTIP Pasal 14.9; 14.10 (b) & 14.12)

50 Usia tidak boleh menjadi penghalang ke hak anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses peradilan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai saksi yang mampu, tunduk pada pemeriksaan dan kesaksian mereka tidak boleh dianggap invalid atau tidak dipercaya hanya dengan alasan umur mereka sebagai anak semata selama usia kedewasaan mereka memungkinkan mereka untuk memberikan kesaksian yang dapat dimengerti dan kredibel, dengan atau tanpa bantuan komunikasi dan bantuan lainnya.

51 Pedoman PBB tentang Korban dan Saksi Anak (UN Guidelines on Child Victims and Witnesses). Lihat juga *Model Guidelines for the Effective Prosecution of Crimes against Children (International Institute of Prosecutors)* pada [www.iap.nl.com](http://www.iap.nl.com) dan International Bureau for Children's Rights pada [www.ibcr.org](http://www.ibcr.org)

52 UNODCCP, Buku Saku tentang Keadilan bagi Korban (*Handbook on Justice for Victims*)

- d. membuat dan menjalankan skema persiapan kesaksian anak dengan memperkenalkan proses peradilan pidana sebelum mereka memberikan kesaksian (ACTIP Pasal 14.9)
- e. menyampaikan informasi yang peka dan sesuai dengan usia anak kepada anak tersebut mengenai proses sidang, peran mereka dalam perkara tersebut, apa yang diharapkan oleh pengadilan dari mereka, serta berupaya mengatasi segala kekhawatiran yang mungkin mereka miliki selama proses persidangan (ACTIP Pasal 14.9; 14.10 (b) & 14.12)
- f. memungkinkan penyediaan rekaman video kesaksian saksi/korban anak untuk diputar di pengadilan sebagai alat bukti resmi (ACTIP Pasal 14.5 & 14.6)
- g. memungkinkan saksi/korban anak untuk bersaksi melalui televisi sirkuit tertutup bila anak diwajibkan menghadiri persidangan untuk menjalani pemeriksaan silang (ACTIP Pasal. 14.5 & 14.6)
- h. memungkinkan saksi/korban anak untuk bersaksi melalui televisi sirkuit tertutup bila anak diwajibkan menghadiri persidangan untuk menjalani pemeriksaan silang (ACTIP Pasal. 14.5 & 14.6)
- i. menjadikan prosedur dan suasana di ruang sidang tidak terlalu mengintimidasi saksi anak (ACTIP Pasal 14.12)
- j. menutup ruang sidang bagi publik bila ada ada kasus yang melibatkan seorang anak baik sebagai saksi atau korban, ataupun anak sebagai pelaku kejahatan . (ACTIP Pasal 14.5; 14.6 & 16.7)
- k. menggunakan seorang mediator untuk mengajukan pertanyaan kepada korban anak (misalnya pekerja sosial, spesialis anak, pengacara/perwakilan korban) di dalam sidang dan untuk membantu selama wawancara dengan polisi dan jaksa penuntut umum<sup>53</sup> (ACTIP Pasal. 14.12)
- l. memberikan instruksi kepada jaksa penuntut umum dan pengacara pembela guna memastikan bahwa pengajuan pertanyaan turut memperhitungkan usia dan kebutuhan khusus anak demi menghindari risiko reviktimisasi (ACTIP Pasal 14.12)
- m. memastikan bahwa 'kepentingan terbaik bagi anak' menjadi pertimbangan yang paling utama selama proses peradilan pidana (ACTIP Pasal 14.12)

**7.2.** Seorang 'wali' musti ditunjuk untuk mendampingi anak sepanjang proses peradilan pidana (ACTIP Pasal 14.10(b))

**7.3.** Pengadilan musti menerapkan dan melembagakan pengembangan kapasitas tenaga ahli bagi aparaturnya kehakiman dan para hakim yang menangani perkara TPPO bagi saksi dan korban anak <sup>54</sup> (ACTIP Pasal 12 (f) & (g) & 16.1)(f) & (g) & 16.1).

53 Hal ini sangat penting bila tertuduh tidak diwakili secara hukum. Semua upaya harus dicurahkan untuk mencegah terdakwa melontarkan pertanyaan secara langsung kepada korban/saksi anak bila mereka melakukan pembelaannya sendiri.

54 Lihat contoh-contoh dari Kelompok Penegakan Hukum Eropa untuk kursus pelatihan 10 sesi ECPAT mengenai perdagangan orang terkait anak pada [www.ecpat.net/eng/pdf/Trafficking\\_Report.pdf](http://www.ecpat.net/eng/pdf/Trafficking_Report.pdf)



## Contoh-contoh Internasional:

### Informasi bagi pelaku orang muda atau anak – Pengadilan Kerajaan

Thailand, membuat video yang di posting di laman Facebook mereka dengan brosur pendukung tentang proses persidangan yang melibatkan anak atau orang muda. Video tersebut berbicara tentang proses persidangan dan menjelaskan tentang hak-hak anak, diantaranya: hak anak untuk memiliki pengacara; untuk didampingi oleh orang tua atau wali mereka; hak atas juru bahasa; dan hak mereka atas perlindungan dan privasi.<sup>55</sup>



**Materi untuk anak tentang datang ke pengadilan** - Di Singapura dan Australia, pengadilan telah membuat buku panduan untuk anak yang diperlukan untuk datang ke pengadilan. Buku panduan tersebut (tersedia dalam beberapa bahasa) memuat informasi yang sesuai umur tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan, apa yang dapat diharapkan anak saat pergi ke pengadilan dan apa yang dibutuhkan oleh pengadilan dari sang anak. Buku panduan tersebut membantu anak mempersiapkan diri menghadapi sidang dan apa yang dibutuhkan oleh pengadilan dari sang anak. Singapura juga mempunyai video yang secara khusus dirancang untuk anak yang menghadiri Pengadilan Keluarga, dengan judul "[Emily's day in the Family Justice Court](#)". Video ini membantu anak memahami tentang kegiatan di pengadilan yang mungkin mereka temui dalam persidangan Pengadilan Keluarga.<sup>56</sup>



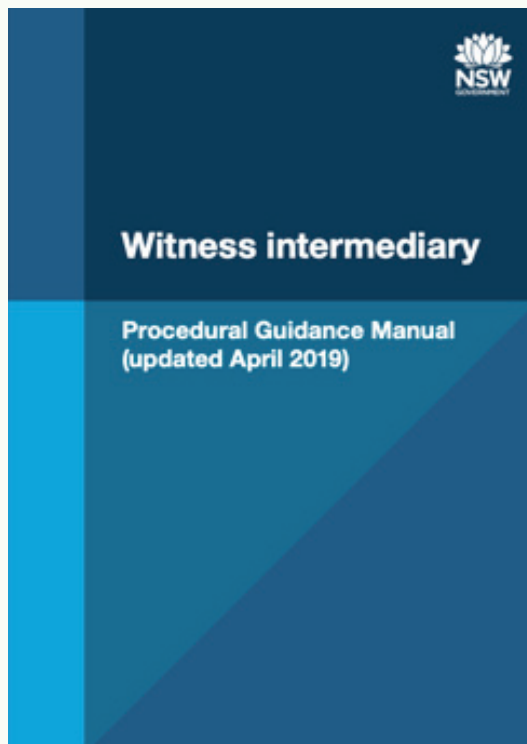
**Pengadilan Keluarga Australia** - mengeluarkan serial buku "*Why am I going to see a Family Consultant*"<sup>57</sup> tersedia bagi dua kelompok umur yang berbeda dan dalam berbagai bahasa. Buku-buku tersebut memberikan informasi kepada anak mengenai proses Pengadilan Keluarga dan apa peran konsultan keluarga (pekerja sosial atau psikolog anak) dalam persidangan. Buku tersebut membantu menghilangkan sebagian kecemasan dan rasa takut yang dimiliki oleh anak karena harus pergi ke pengadilan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang sulit bagi mereka.

55 <https://www.facebook.com/watch/?v=872023606597713>

56 <https://www.judiciary.gov.sg/docs/default-source/attending-court-docs/sara-goes-to-court-english.pdf>

57 <https://www.fccoa.gov.au/resources/publications/fl/why-family-consultant-5-8>

**Mengubah suasana ruang sidang** - Di Australia, pengadilan negara bagian Victoria telah menjalankan pengadilan khusus bagi anak. Pengadilan telah didesain agar tidak terlalu resmi dan dengan demikian tidak terlampau mengintimidasi anak, serta terdapat hakim dan petugas pengadilan yang telah dilatih khusus untuk mengadili perkara-perkara ini.



**Mediator Saksi Anak** - Di samping contoh-contoh penggunaan mediator yang telah dibahas sebelumnya dalam dokumen ini, ada 'contoh juara' terkait anak atau tenaga ahli mediator anak (terutama untuk perkara yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak) yang memfasilitasi komunikasi dengan saksi anak melalui proses sidang dan memperluas penggunaan bukti rekaman dalam persidangan pengadilan pidana. Tujuan seorang mediator ini adalah untuk mengurangi trauma yang dialami oleh saksi anak dalam proses peradilan pidana sambil tetap menjaga hak terdakwa atas Peradilan yang Adil. Gambar di sini adalah Pedoman & Manual Prosedural yang dibuat oleh Pemerintah New South Wales di Australia untuk memastikan kepentingan terbaik anak terlindungi dan untuk menjelaskan secara gamblang batasan perannya.

**Berkomunikasi dengan Anak di Pengadilan** – *Sekolah Hukum dan Sekolah Ilmu Sosial Terapan, Universitas College Cork, Irlandia*, membuat sebuah panduan bagi praktisi untuk berbicara dan bertanya kepada anak dalam ruang lingkup pengadilan. Publikasi tersebut memberikan contoh bagaimana cara untuk bertanya dan cara untuk TIDAK mengajukan pertanyaan kepada anak di pengadilan.<sup>58</sup>

58 *Communicating with Children in Court - a useful guide in child protection cases. Dibuat oleh Dr Kenneth Burns, Dr Conor O'Mahony, Carly McAuley (Triangle), Dr Fiachra Ó'Súilleabháin dan Dr Elaine O'Callaghan, School of Law and School of Applied Social Studies, University College Cork, Ireland, and Triangle. Didanai bersama oleh Program Hak, Kesetaraan & Kewarganegaraan (REC) Uni Eropa.* .  
<https://www.ucc.ie/en/media/research/ideachildrights/Communicatingwithchildrenincourt.pdf>



### 3. Partisipasi BERBICARA DAN BERTANYA KEPADA ANAK-ANAK DALAM PERSIDANGAN

Pada bagian ini, kami berikan contoh pendekatan pemeriksaan. **Tulisan berwarna merah muda menunjukkan cara yang TIDAK tepat untuk bertanya** dan tulisan berwarna biru adalah contoh pertanyaan ramah anak. Semua anak memiliki gaya dan kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda. Anda harus bisa luwes dan menyesuaikan pendekatan Anda agar dapat memenuhi kebutuhan setiap anak.

Rencanakan pertanyaan terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan lakukan dalam urutan yang logis dan kronologis. Bantu anak agar paham ketika ada perubahan topik. **Kita sudah selesai membicarakan tentang apa yang terjadi di kelasmu. Sekarang, saya ingin bertanya tentang apa yang terjadi di lapangan bermain.**

Anak-anak terbiasa menghadapi orang dewasa yang mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Anak-anak harus diberi tahu, dan diingatkan, dalam lingkungan persidangan situasi ini tidak belaku. **Saya tidak tahu karena tidak ada di sana.**

Ajukan pertanyaan terbuka bila memungkinkan. Jika Anda mengajukan pertanyaan tertutup yang khusus atau pertanyaan dengan pilihan jawaban yang terbatas untuk menegaskan suatu detail, segeralah kembali ke pertanyaan terbuka. Jika menggunakan pertanyaan dengan pilihan jawaban terbatas, selalu tawarkan pilihan ketiga. **Waktu itu, kamu ada di sana bersama Ibu? Coba ceritakan apa yang terjadi? Warnanya hitam atau merah? Warnanya hitam, merah, atau warna lain?**

Jika terpaksa menggunakan pertanyaan ya/tidak, hindari bertanya secara berurutan. Jika pertanyaan seperti ini satu-satunya jalan, putar balikkan beberapa pertanyaan untuk memastikan campuran pertanyaan ya atau tidak. Cara seperti ini akan meningkatkan akurasi jawaban anak. **(T) Apa kamu dan Lucy tinggal bersama Ibu? (J) Ya. (T) Apa kamu dan Lucy tinggal bersama Ayah? (J) Tidak. (T) Apa kamu dan Lucy pernah tinggal bersama Ayah? (J) Ya.**

Di sekolah dan di rumah, anak-anak terbiasa diajak menebak saat tidak mengetahui jawaban atas suatu pertanyaan. Anak-anak harus diajarkan bahwa wawancara dengan profesional dan di persidangan memiliki aturan yang berbeda. **Saat kita bicara di ruangan ini, kita tidak bermain tebak-tebakan. Kalau kamu tidak tahu jawabannya, bilang 'Saya tidak tahu.'**

Anak-anak harus diajukan pertanyaan dengan cara yang jelas-jelas menuntut adanya jawaban. Alih-alih membuat pernyataan

atau komentar, ungkapkan pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya.

**Kamu takut lbumu tahu. Apa kamu takut lbumu tahu?**

Sebaiknya selalu hindari membuat pertanyaan dengan penekanan (membuat pernyataan dan menambahkan kalimat tanya singkat yang mengajak anak agar menyetujuinya). **Paman David tidak menyentuhmu, ya kan? Tadi kamu bilang Paman David menyentuhmu. Paman David bilang dia tidak menyentuhmu. Apa Paman David benar-benar menyentuhmu?**

Anak-anak seringkali menangkap makna pertanyaan secara harfiah. Mereka jarang dapat membayangkan alasan suatu pertanyaan diajukan.

**(T) Apa kamu sedang di sekolah? (J) Tidak, saya sedang di persidangan, berbicara dengan Om. Apa kamu pergi ke sekolah? (T) Bisa to long ceritakan apa yang terjadi di Sekolah? (J) Bisa. Tolong ceritakan apa yang terjadi di Sekolah waktu X terjadi.**

Bertanyalah secara spesifik. Anak-anak tidak terlalu bisa menggeneralisasikan pertanyaan, terutama saat mereka tidak mengerti alasan suatu pertanyaan diajukan. Saat merencanakan pertanyaan, perkirakan apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disalahartikan.

**(T) Apa kamu memakai pakaian pada saat itu? (J) Tidak. (mungkin berarti dia mengenakan seragam sekolah atau piyama). Apa yang waktu itu kamu pakai? Anak-anak yang berusia dini mungkin mengaitkan kata 'sentuh' hanya untuk tangan atau jari. (T) Apa Hari menyentuhmu? (J) Tidak. Apa ada bagian tubuh Hari yang menyentuh tubuhmu?**

Anak-anak kemungkinan tidak dapat menentukan motif orang lain. Pertanyaan-pertanyaan demikian sebaiknya sebisa mungkin dihindari karena dapat memunculkan jawaban yang tidak bisa diandalkan. Anak-anak, terutama yang berusia dini, sulit menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kata "Kenapa", **(T) Kenapa Dennis membawamu ke taman? (J) Saya tidak tahu. Apa yang membuat Dennis membawamu ke taman hari itu?**

Anak-anak mungkin sulit menjawab pertanyaan tentang kapan sesuatu hal terjadi. Sebagian anak-anak akan menjawab "kemarin" atau "minggu lalu" untuk kejadian lampau. **Apakah waktu itu hari sekolah? Apakah sebelum atau setelah makan malam? Apakah saat terang atau gelap, atau kamu tidak tahu?**

**Pemeriksaan silang** - Ketika seorang saksi anak menjalani pemeriksaan silang maka pemeriksaan tersebut harus dilakukan melalui televisi sirkuit tertutup, bukan dari dalam ruang sidang. Memberikan bukti kesaksian dengan cara seperti ini membuat anak tetap berada di ruang berbeda, terpisah dari terdakwa dan terlindungi dari suasana tidak bersahabat dan formalitas ruang sidang. Di Vietnam, seorang anak korban TPPO harus "dipisahkan dari terdakwa." Korban berpartisipasi dalam persidangan dari sebuah ruangan terpisah di mana persidangan disiarkan melalui sebuah CCTV secara daring. Kuasa hukum anak, wali, pekerja psikososial, atau pekerja perlindungan anak wajib hadir di ruangan.

Di Pengadilan Anak Victoria, Australia, anak dapat memberikan keterangannya sebagai bukti kesaksian melalui CCTV, yang dibantu oleh pendamping pilihan mereka. Kamera diposisikan sedemikian rupa agar saksi anak tidak dapat melihat terdakwa, tetapi hakim, jaksa, dan pengacara dapat melihat anak.<sup>59</sup>

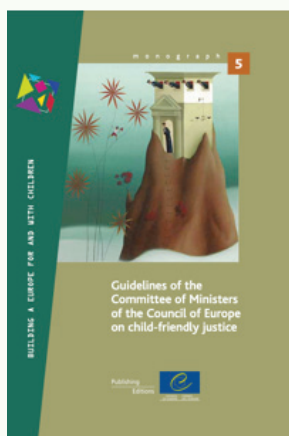
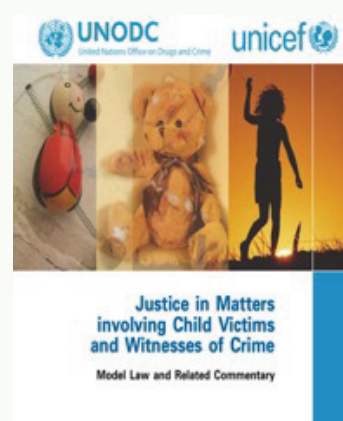
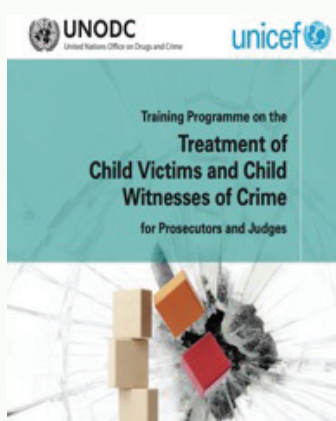
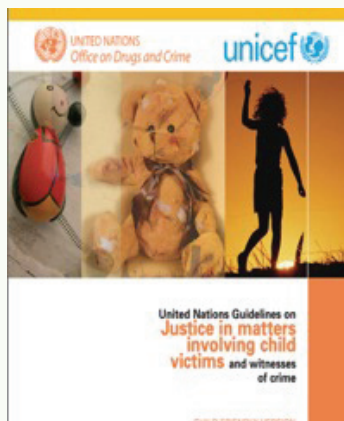
59 See also the ASEAN ACT Webinar on Alternative Modes of Victim Testimony at <https://aseanactpartnershiphub.com/event/evidence-presentation/>

### Menciptakan sebuah ruang sidang yang 'ramah anak' - Di Vietnam, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 01 dan 02/2017/TT-TANDTC mengharuskan ruang sidang yang

mengadili perkara yang melibatkan anak diatur sedemikian rupa agar ramah [anak], memastikan kepentingan terbaik [anak] dan para hakim mengenakan seragam administrasi Pengadilan Rakyat bukan toga hakim. Surat tersebut juga menetapkan bahwa untuk perkara anak yang melibatkan pelecehan seksual, kekerasan, atau perdagangan orang, maka pengadilan harus mengadakan sidang tertutup.



**Pedoman, pelatihan, dan usulan undang-undang khusus untuk perkara yang melibatkan anak** - UNODC bersama dengan UNICEF membuat beberapa pedoman, pelatihan<sup>60</sup> dan usulan undang-undang (*model laws*) untuk membantu kepolisian, jaksa, dan hakim untuk mengadili perkara yang melibatkan anak.



**Pedoman tentang peradilan yang ramah anak** - Dewan Eropa menerapkan pedoman tentang peradilan yang ramah anak untuk secara khusus memastikan agar: (1) anak dapat turut serta dalam persidangan; (2) kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam segala persoalan yang menyangkut diri mereka; (3) anak diperlakukan dengan perlakuan baik, kepekaan, keadilan, dan rasa hormat; (4) mereka dilindungi dari diskriminasi; dan (5) prinsip negara hukum juga diterapkan kepada anak seperti halnya kepada orang dewasa.<sup>61</sup>

60 [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training\\_Programme\\_on\\_the\\_Treatment\\_of\\_Child\\_Victims\\_and\\_Child\\_Witnesses\\_of\\_Crime\\_-\\_Prosecutors\\_and\\_Judges.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Prosecutors_and_Judges.pdf)

61 Lihat <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900016804b2cf3>



INDIKATOR

8

Layanan khusus bagi penyandang disabilitas



## Indikator 8: Pemberian Layanan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

### Ringkasan

Korban perdagangan orang mungkin mengalami disabilitas akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, dan individu penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang dapat secara khusus menjadikan mereka sasaran para pelaku perdagangan orang. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi sejumlah hambatan fisik, komunikasi dan perlakuan ketika mengakses sistem peradilan, misalnya disabilitas seseorang dapat membuat seorang aparat peradilan pidana mengabaikan mereka sebagai seorang saksi yang kredibel; orang dengan isu mobilitas mungkin menghadapi rintangan fisik

**DISABILITY IS NOT A BARRIER**  
**DISCRIMINATION IS**

dalam mengakses institusi peradilan pidana; dan layanan dukungan khusus tidak selalu tersedia bagi korban dengan disabilitas. Oleh karena itu sangat penting bahwa korban dengan disabilitas diidentifikasi sejak dini, dan layanan disediakan untuk memastikan bahwa mereka dapat secara aktif turut serta dalam proses peradilan pidana dan diikutsertakan dalam segala pengambilan putusan serta persoalan yang melibatkan dirinya.

Selain itu, disabilitas tidak selalu terlihat oleh orang lain sehingga penting sekali bahwa Pengadilan mengambil langkah aktif untuk mengidentifikasi korban/saksi dan terdakwa penyandang disabilitas agar akomodasi yang layak dapat diberikan guna memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan pidana dan mengakses hak-haknya.





## Prinsip

### *Apa yang harus diimplementasikan?*

Para hakim dan Pengelola Pengadilan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada korban dengan disabilitas bersifat fleksibel dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual mereka, dengan memastikan:

- 8.1.** Mengakomodasi layanan yang layak guna memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pengadilan dan dapat berpartisipasi dalam persidangan secara efektif dengan:
  - a. memastikan bahwa gedung pengadilan dan ruang sidang dapat diakses oleh korban dengan disabilitas (misalnya bila korban menggunakan kursi roda, maka perlu dipertimbangkan untuk mengadakan sidang di lantai dasar, secara jarak jauh atau menggunakan bukti video; memastikan bahwa ada cukup ruang bagi korban untuk bergerak di dan seputar ruang sidang. Apakah kursi roda mereka cukup untuk termuat di tempat saksi?) (ACTIP Pasal 14.12)
  - b. menghilangkan segala rintangan di gedung pengadilan/ruang sidang yang mungkin dapat menghalangi korban dengan disabilitas penglihatan atau mobilitas (ACTIP Pasal 14.12)
  - c. menyediakan rambu di pengadilan yang menggantikan [Simbol Aksesibilitas Universal](#) untuk mengarahkan, mempromosikan, dan memublikasikan aksesibilitas dari fitur-fitur yang ada di tempat, program, dan layanan di pengadilan bagi penyandang disabilitas (ACTIP Pasal 14.10(b) & 14.12)
  - d. memberikan informasi tentang proses peradilan pidana bagi perkara TPPO dalam beragam format yang dapat diakses seperti braille, konten video media audio yang deskriptif dengan keterangan dan sulih teks; materi cetak yang sesuai dengan pedoman aksesibilitas (ACTIP Pasal 14.10(b) & 14.12)
  - e. memastikan adanya juru bahasa isyarat terlatih<sup>62</sup> yang tersedia agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif di dalam persidangan (ACTIP Pasal 14.10(b) & 14.12)
  - f. menggunakan seorang mediator bagi seseorang dengan disabilitas kognitif untuk mengajukan pertanyaan kepada korban di pengadilan serta membantu polisi dan jaksa selama wawancara<sup>63</sup> (ACTIP Art. 14.10(b) & 14.12)
- 8.2.** Pengadilan mengumpulkan data terpilah disabilitas menggunakan metode *Washington Group Short Questions (Pertanyaan Singkat Kelompok Washington)*. (ACTIP Pasal 14.10 & 14.12)
- 8.3.** Pengadilan telah menjalin kemitraan dengan Organisasi Penyedia Layanan Disabilitas (OPD) agar dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan dari korban/saksi/dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. (ACTIP Pasal 14.10)
- 8.4.** Pengadilan telah melakukan pengembangan kapasitas bagi hakim, jaksa dan aparatur pengadilan untuk pengaturan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas (ACTIP Pasal 14.12 & 16.12)

62 Juru bahasa haruslah seseorang yang memenuhi syarat, tidak memihak dan dapat diterima oleh pengadilan dan korban Lihat 'Equal Treatment Benchbook' (Buku Pegangan Hakim tentang Perlakuan yang Setara) dibuat oleh Pengadilan Inggris yang memberikan nasihat kepada para hakim tentang cara berkomunikasi melalui seorang juru bahasa.. <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/12/Equal-Treatment-Bench-Book-December-2021-interim-update.pdf>

63 Hal ini sangat penting bila tertuduh tidak diwakili secara hukum. Semua upaya harus dicurahkan untuk mencegah terdakwa melontarkan pertanyaan secara langsung kepada korban bila terdakwa melakukan pembelaannya sendiri.



## Contoh-contoh Internasional:



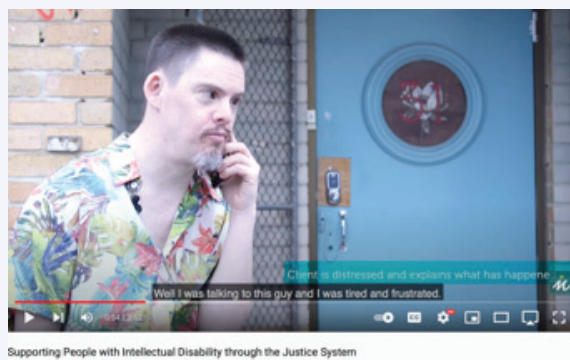
**Simbol Aksesibilitas Universal** - digunakan secara luas di seluruh dunia, baik di pengadilan, bandara, rumah sakit, dan institusi pemerintah lainnya maupun di media sosial seperti Twitter dan Facebook serta situs-situs *streaming* video.

### Video yang dapat diakses *online* -

Departemen Kehakiman New South Wales di Australia membuat sebuah video bagi penyandang disabilitas kognitif yang diperlukan untuk datang ke pengadilan. Video tersebut menggunakan aktor dengan disabilitas kognitif dan seseorang dengan disabilitas penglihatan, video itu juga menjelaskan tentang proses pergi ke pengadilan dan apa saja yang diperlukan.<sup>64</sup>



**Kemitraan dengan Ornop dan penyedia layanan khusus di Komunitas-** Menghubungkan saksi dengan layanan pendukung khusus seperti advokat, konselor untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya, yang memiliki keahlian khusus untuk bekerja dengan kelompok disabilitas. Dengan menggunakan seorang advokat atau menghubungkan penyandang disabilitas dengan Ornop, maka saksi akan memiliki dukungan yang mereka butuhkan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Layanan itu dapat membantu mereka memahami apa saja pilihan yang tersedia bagi mereka, bagaimana mendapatkan nasihat hukum, dan layanan tersebut juga dapat menjelaskan dan mendukung mereka untuk melalui proses peradilan.



64 <https://www.youtube.com/watch?v=0WaTnsw3UWQ>

### Materi tertulis yang dapat diakses -

Departemen Kehakiman di NSW Australia telah membuat brosur bagi korban dan saksi penyandang disabilitas. Brosur ini memberi saran bagi penyandang disabilitas mengenai sejumlah layanan yang diberikan oleh pengadilan dan proses untuk mencari bantuan dari pengadilan. Brosur tersebut juga meminta persetujuan saksi agar pengadilan dapat menghubungkan saksi dengan penyediaan layanan eksternal yang mungkin dapat membantu. Brosur tersebut tersedia di Ornop dan organisasi pendukung disabilitas serta pada laman Pengadilan.<sup>65</sup>

### Media Sosial dan Penyandang Disabilitas –

Pengadilan perlu memastikan bahwa semua materi dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk unggahan di media sosial. Twitter memberikan pedoman tentang bagaimana gambar dapat diakses oleh orang dengan disabilitas penglihatan atau memiliki penurunan penglihatan (*low-vision*).<sup>66</sup>



**Kerangka Kelompok Washington untuk Pertanyaan Statistik Disabilitas<sup>67</sup>** - akan membantu pengadilan untuk memahami korban/saksi dewasa dan terdakwa dalam hal kemampuan (batasan dalam fungsi) dan segala hambatan lingkungan yang ada (fisik, sosial, budaya, atau legislasi) yang dapat membatasi partisipasi mereka. Terdapat pertanyaan-pertanyaan khusus bagi anak berusia 5 tahun dan di bawahnya serta bagi anak dan remaja usia 5-17 tahun.<sup>68</sup>

#### Rangkaian Pertanyaan Singkat WG tentang Keterbatasan Fungsi Tubuh (WG Short Set on Functioning Questions)

##### Pengantar WG-SS:

Pewawancara membacakan: "Pertanyaan-pertanyaan berikut menanyakan tentang kesulitan yang mungkin Anda alami saat melakukan suatu kegiatan karena KENDALA KESEHATAN."

##### PENGLIHATAN

**VIS\_SS** Apakah [Anda/dia] memiliki kesulitan melihat, sekalipun jika menggunakan kacamata? Menurut Anda... [Bacakan kategori jawaban]

1. Tidak sulit
2. Agak sulit
3. Sangat sulit
4. Tidak bisa sama sekali
5. Menolak
6. Tidak tahu

##### PENDENGARAN

**HEAR\_SS** Apakah [Anda/dia] memiliki kesulitan mendengar, sekalipun jika menggunakan alat bantu dengar? Menurut Anda... [Bacakan kategori jawaban]

1. Tidak sulit
2. Agak sulit
3. Sangat sulit
4. Tidak bisa sama sekali
5. Menolak
6. Tidak tahu

##### MOBILITAS

**MOB\_SS** Apakah [Anda/dia] memiliki kesulitan berjalan atau menaiki anak tangga? Menurut Anda... [Bacakan kategori jawaban]

1. Tidak sulit
2. Agak sulit
3. Sangat sulit
4. Tidak bisa sama sekali
5. Menolak
6. Tidak tahu

65 <https://www.justice.nsw.gov.au/diversityservices/Documents/Request4CourtTransFinalAccess.pdf>

66 <https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions>

67 Pertanyaan Kelompok Washington tersedia dalam berbagai bahasa, lihat: <https://www.washingtongroup-disability.com/resources/translations-of-wg-question-sets/>

68 Untuk anak-anak usia 5-17 tahun lihat: [https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Washington\\_Group\\_Questionnaire\\_5\\_-\\_WG-UNICEF\\_Child\\_Functioning\\_Module\\_ages\\_5-17\\_.pdf](https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/Washington_Group_Questionnaire_5_-_WG-UNICEF_Child_Functioning_Module_ages_5-17_.pdf) dan dalam berbagai bahasa lihat: <https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/>

### 8.3.6 Physical and Sensory

Physical barriers may prevent persons with physical disabilities from accessing the courthouse or moving to or inside the courtrooms themselves. Sensory barriers may prevent people with vision or hearing impairments from being able to understand, follow and fully participate in proceedings.

## 8.4 Creating Disability-Inclusive Courts

The first step to making courts more disability-inclusive is to ensure that court staffs are able to identify people with disabilities and know how to find out what assistance they may need. In the table below are some of the factors to consider as you develop your plan to make your court more disability-inclusive.





8.4.1 Ability of persons with disabilities to enter and move within courts and navigate proceedings	
Disability Type	Factors to Consider
Mobility impairments	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the court room on the ground floor or accessible by a lift?</li> <li>If the courtroom is on the ground floor – are there still any steps to enter the court room, or a ramp?</li> <li>Is the court door wide enough to accommodate wheelchairs?</li> <li>Is there space for wheelchair users to move around the courtroom?</li> <li>Where will a person in a wheelchair sit in the courtroom when they are giving evidence?</li> <li>Are court hallways wide and clear of furniture or debris?</li> <li>Is there a wheelchair accessible toilet available?</li> </ul>
Visual impairments	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do all court staff know that a guide dog may enter the courtroom?</li> <li>Will court staff assist with directions and/or walk with the client to the courtroom?</li> <li>Do elevators have braille buttons or a sound system to announce the floors?</li> <li>For reading documents, can the document be emailed to the client as one that can be “read” by someone with a visual impairment, using appropriate software?</li> </ul>
Any kind of disability	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is courtroom signage clear?</li> <li>Are staffs available and trained to help users to navigate their way around the court?</li> </ul>
8.4.2 Ability of persons with disabilities to prepare for, and participate in proceedings	
Any kind of disability	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is disability-inclusive information available: By phone? Email? In person at the registry? Via the court website? – Does it include information about the law, the process and the help available? (From court, legal aid, other specialised services?)</li> </ul>
Hearing impairments	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is there a sign interpreter available or a ‘hearing loop’ in court?</li> <li>Is there someone available to answer any questions on what will happen on the day through a text phone, email, skype or some other message service?</li> </ul>


















**Lampiran 1:**  
**8 Indikator Penilaian**  
**Mandiri VSC**














# INDIKATOR PENILAIAN MANDIRI VSC

-  **'GREEN'** – Negara telah memenuhi dan mengimplementasikan semua kriteria yang ada pada indikator
-  **'ORANGE'** – Negara dalam tahap transisi dan hanya sebagian yang telah memenuhi kriteria dari indikator. Beberapa bagian belum memenuhi atau diimplementasikan sepenuhnya
-  **'RED'** – Negara belum memenuhi kriteria dari indikator ini dan lemah di bagian tersebut
-  **'BLUE'** – Situasi saat ini belum diketahui atau belum jelas

<b>INDIKATOR 1</b>  <b>Keselamatan &amp; Privasi</b>  <b>Memastikan keselamatan dan privasi saksi/korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</b>	<b>1.1 Pemberlakuan ketentuan persidangan tertutup ketika saksi/korban memberikan kesaksian</b>    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini
	<b>1.2 Penilaian risiko/program pengelolaan keselamatan dengan langkah-langkah terperinci untuk melindungi saksi/korban selama proses peradilan pidana</b>    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini
	<b>1.3 Putusan dalam perkara TPPO dibuat anonim dan dipublikasikan secara daring</b>    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini
	<b>1.4 Terdapat prosedur pengadilan yang melarang pemublikasian informasi detail mengenai saksi/korban oleh media atau pada media sosial</b>    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

<b>INDIKATOR 2</b>  <b>Alat bukti dan proses persidangan</b>	<b>2.1 Perkara TPPO diprioritaskan atau dipercepat</b>    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini
	<b>2.2 Terdapat langkah-langkah untuk memastikan bahwa saksi/korban diberikan peluang dan didukung dalam mengikuti proses persidangan, dengan cara:</b>
	a) Menggunakan saksi ahli (misalnya seorang saksi perantara) untuk memberikan bukti bila diperlukan    
	Rincian * Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



## Alat & bukti persidangan

### Bukti Primer – tentang bagaimana kesaksian saksi/korban dicatat dan dihadirkan dalam proses persidangan

b) Mengizinkan saksi/korban didampingi oleh orang yang mereka pilih, saat memberikan kesaksian di pengadilan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

c) Memastikan adanya juru bahasa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saksi/korban sehingga mereka dapat benar-benar berpartisipasi dalam persidangan.



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 2.3 Tindakan perlindungan dilakukan untuk memastikan saksi/korban dapat memberikan kesaksian tanpa bertemu dengan terdakwa, dengan cara:

a) Memastikan terdakwa tidak dapat melihat saksi/korban, adanya penyekat atau menggunakan ruangan berbeda



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

b) Menggunakan teknologi konferensi video agar saksi/korban dapat memberikan kesaksian secara jarak jauh dari lokasi atau ruangan yang berbeda



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

c) Bukti kesaksian video yang sudah direkam terlebih dahulu dapat diputar di pengadilan sebagai pengganti kehadiran saksi/korban



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

d) Tersedia pintu masuk dan ruang tunggu terpisah bagi saksi/korban selama masa persidangan, baik sebelum dan sesudah memberikan kesaksian



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 2.4 Penggunaan 'victim impact statements' guna memastikan bahwa hakim memiliki penilaian komprehensif mengenai dampak terhadap korban yang ditimbulkan oleh pelaku (untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita)



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

INDIKATOR

3



## Aparat penegak hukum

**Interaksi – Bagaimana aparat penegak hukum dan hakim berinteraksi dengan saksi/korban.**

### 3.1 Terdapat unit/petugas khusus untuk menangani perkara-perkara TPPO di pengadilan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 3.2 Pengadilan mempunyai pedoman dan Prosedur Operasi Standar (SOP) bagi hakim dan semua aparatur pengadilan tentang cara menangani perkara TPPO cases.



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 3.3 Pengadilan mempunyai peraturan khusus dan kode etik yang mengatur tentang standar perilaku yang diharapkan dari para hakim dan staf pengadilan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 3.4 Pelatihan TPPO, termasuk tentang pendekatan informasi trauma



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

INDIKATOR

4



## Informasi & layanan

**Tersedianya informasi dan layanan bagi saksi/korban perdagangan orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana**

### 4.1 Pengadilan menyediakan informasi dan materi yang tepat dengan berbagai format kepada saksi/korban perdagangan orang, dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, tanpa istilah hukum yang rumit, mengenai:

a) Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang; proses peradilan pidana termasuk posisi hukum saksi/korban; hak-hak mereka; pilihan mereka (untuk berpartisipasi atau tidak); layanan pendukung yang tersedia bagi korban dan estimasi jangka waktu persidangan perkara TPPO



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



## Informasi & layanan

b) Prinsip non-hukuman sehingga saksi/korban memahami bahwa mereka tidak diminta pertanggungjawaban secara pidana atau administratif atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, bila perbuatan tersebut berkaitan langsung dengan perdagangan yang mereka alami



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

c) Hak saksi/korban TPPO untuk mendapatkan restitusi/kompensasi (bila ada) serta proses pengajuannya



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

**4.2 Pengadilan telah menunjuk seorang narahubung/manajer kasus/koordinator saksi korban yang akan berhubungan dengan korban, memperbarui perkembangan status kasus dan menyediakan informasi rujukan kepada layanan pendukung korban yang tersedia bagi mereka**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



Pemulihan fisik, psikologis & sosial korban

**Indikator yang terkait dengan langkah-langkah yang tersedia bagi pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban perdagangan orang**

**5.1 Harus ada MoU atau perjanjian antara Pengadilan dan organisasi masyarakat sipil/non-pemerintah (Ornop) untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi penyediaan layanan dan dukungan bagi korban-korban TPPO**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

**5.2 Harus ada protokol antar lembaga untuk layanan 'paripurna' atau 'satu atap' yang terkoordinir bagi para korban TPPO sehubungan dengan program-program konseling, medis, tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, dokumen hukum dan perlindungan sosial yang lebih luas**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



## Layanan medis & forensik

**Indikator yang terkait dengan penyediaan layanan medis dan forensik bagi para korban perdagangan orang**

### 6.1 Jaksa dan hakim menerima pelatihan khusus tentang kekuatan dan kelemahan bukti-bukti forensik terkait dengan kekerasan seksual dan fisik



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 6.2 Terdapat protokol nasional untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kekerasan seksual dan dibuat berdasarkan pedoman WHO



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 6.3 Adanya pertukaran informasi resmi setiap tahun di antara lembaga TPPO regional dan lembaga spesialis forensik di kawasan ASEAN dalam rangka mengembangkan keahlian dan memupuk kolaborasi regional



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



## Layanan khusus bagi anak

**Indikator-indikator khusus yang spesifik terkait dengan anak sebagai korban atau saksi perdagangan orang**

### 7.1 Pengadilan memberikan pengamanan bagi perlindungan anak yang menjadi korban/saksi/terdakwa, dengan cara:

a) Memastikan adanya langkah untuk meminimalkan penundaan dalam proses peradilan pidana



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

b) Melindungi privasi anak dengan melarang pengidentifikasian saksi/korban anak atau terdakwa anak



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

c) Senantiasa memberi tahu anak tersebut tentang peran mereka dan cakupannya, waktu serta perkembangan persidangan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

d) Membuat dan menjalankan skema persiapan kesaksian anak untuk membuat anak-anak mengenali dengan baik proses peradilan pidana sebelum mereka memberikan kesaksian



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini





## Layanan khusus bagi anak

### Indikator-indikator khusus yang spesifik terkait dengan anak sebagai korban atau saksi perdagangan orang

e) Menyampaikan informasi yang peka dan sesuai dengan usia anak mengenai proses sidang, peran mereka dalam kasus tersebut, apa yang diharapkan oleh pengadilan dari mereka serta berupaya mengatasi segala kekhawatiran yang mungkin mereka miliki selama proses persidangan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

f) Memungkinkan penyediaan rekaman video kesaksian anak untuk diputar di pengadilan sebagai alat bukti resmi



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

g) Memungkinkan (sebagai standar minimum layanan) penyediaan privasi penyekat antara saksi/korban anak dan terdakwa dalam proses persidangan



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

h) Memungkinkan korban/saksi anak untuk bersaksi melalui kamera CCTV bila anak diwajibkan menghadiri persidangan untuk menjalani pemeriksaan silang



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

i) Menjadikan prosedur dan suasana di ruang sidang tidak terlalu mengintimidasi bagi saksi anak



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

j) Menutup ruang sidang bagi publik bila ada kasus yang melibatkan seorang korban/saksi anak atau terdakwa anak



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

k) Menggunakan perantara saat memberikan pertanyaan kepada korban anak (misalnya pekerja sosial, spesialis anak, pengacara/perwakilan korban) di dalam sidang dan untuk membantu selama wawancara dengan polisi dan jaksa



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

l) Menyediakan instruksi kepada jaksa dan pengacara pembela guna memastikan bahwa pengajuan pertanyaan mesti memperhitungkan usia dan kebutuhan khusus anak demi menghindari risiko reviktimisasi



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

INDIKATOR

7

Lanjutan



## Layanan khusus bagi anak

m) memastikan bahwa 'kepentingan terbaik bagi anak' menjadi pertimbangan yang paling utama selama proses peradilan pidana



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 7.2 Seorang 'wali' ditunjuk untuk mendampingi anak sepanjang proses peradilan pidana



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

### 7.3 Pengadilan menerapkan dan melembagakan pengembangan kapasitas spesialis bagi para petugas kehakiman dan para hakim yang menangani korban dan saksi TPPO anak



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

INDIKATOR

8



## Layanan khusus bagi penyandang disabilitas

### Penyediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas

### 8.1 Mengakomodir layanan yang layak, guna memastikan penyandang disabilitas mampu mengakses pengadilan dan dapat berpartisipasi dalam persidangan secara efektif, dengan cara:

a) Memastikan gedung pengadilan dan ruang sidang dapat diakses oleh saksi/korban penyandang disabilitas



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

b) Menghilangkan segala hambatan di gedung pengadilan/ruang sidang yang mungkin menghalangi seorang saksi/korban dengan gangguan penglihatan atau hambatan mobilitas atau masalah mobilitas



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

c) Memasang papan rambu di pengadilan yang menggunakan Simbol Aksesibilitas Universal



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

d) Memberikan informasi tentang proses peradilan pidana untuk kasus-kasus TPPO dalam beraneka ragam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



Layanan khusus bagi penyandang disabilitas

Penyediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas

e) Memastikan tersedianya juru bahasa isyarat terlatih agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif di dalam persidangan (ACTIP Pasal 14.10(b) & 14.12)

Bila korban tunarungu atau memiliki gangguan pendengaran, mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam persidangan bila mereka tidak memahami jalannya persidangan atau tidak dapat berkomunikasi dengan jaksa dan hakim



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

Juru bahasa haruslah seseorang yang memenuhi syarat, tidak memihak dan dapat diterima oleh pengadilan dan korban



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

f) Menggunakan seorang perantara bagi seseorang dengan disabilitas kognitif untuk melontarkan pertanyaan kepada korban di pengadilan serta membantu polisi dan jaksa selama wawancara



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

**8.2 Pengadilan mengumpulkan data terpilah disabilitas menggunakan Washington Group Short Questions**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

**8.3 Pengadilan telah menjalin kemitraan dengan Organisasi Penyedia Jasa Disabilitas (OPD) agar dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan dari para korban/saksi/terdakwa penyandang disabilitas**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini

**8.4 Pengadilan telah melakukan pengembangan kapasitas bagi para hakim, jaksa dan staf pengadilan untuk menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas**



Rincian

\* Jika memungkinkan, tuliskan aturan/prosedur/ketentuannya disini



Australian Aid  | ASEAN-Australia Counter Trafficking

# Pengadilan Peka Terhadap Korban

Panduan untuk Negara-Negara Anggota ASEAN